

PANEL PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH

**LAPORAN KEEMPAT
PROYEK LNG TANGGUH**

MARET 2006

DAFTAR ISI

I.	Ringkasan dan Rekomendasi Utama	3
II.	Perkembangan Politik/Keamanan	11
III.	Gambaran Umum.....	17
IV.	Pembangunan dan Ketenagakerjaan	21
V.	Keamanan dan Hak Asasi Manusia	26
VI.	Penyampaian Keuntungan Jangka Pendek.....	30
VII.	Koordinasi dan Dukungan bagi Pemerintah Daerah.....	34
VIII.	Aliran pendapatan bagi Kawasan.....	37
IX.	Lingkungan Hidup	41
X.	Informasi Publik.....	44

I. Ringkasan dan Rekomendasi Utama

Panel Penasehat Independen Tangguh (“TIAP”) dibentuk oleh BP guna menyediakan saran eksternal bagi para pengambil keputusan senior berkait aspek non-komersial dari Proyek LNG Tangguh (atau selanjutnya disebut “Tangguh” atau “Proyek”). Panel ini dipimpin oleh mantan Senator AS, George Mitchell, serta Lord Hannay of Chiswick dari Inggris, Duta Besar Sabam Siagian dari Jakarta dan Pendeta Herman Saud dari Jayapura. Panel bertugas memberikan saran bagi BP mengenai bagaimana Tangguh dapat mencapai potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia dengan memperhitungkan dampak Proyek terhadap masyarakat dan lingkungan, dampaknya terhadap keadaan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dan di Papua secara khusus, serta evaluasinya ‘resiko’ di Indonesia dan Papua.

Ini merupakan laporan Panel yang keempat. Tiga laporan sebelumnya diajukan pada bulan September 2002, November 2003 dan Februari 2005, juga tanggapan BP tersedia di situs internet Panel dan BP.¹ Bulan November 2005, Panel melakukan perjalanan ekstensif ke Indonesia, mengunjungi lokasi LNG, desa-desa di kawasan Teluk Bintuni, Kota Babo yang merupakan ibukota Kabupaten yang baru di Bintuni, serta kota Jayapura dan Jakarta. Dalam kunjungan ini Panel kembali bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia, termasuk penduduk desa dan pemimpin mereka di desa-desa yang terkena dampak langsung (DTDP) di kawasan pantai utara dan selatan Teluk Bintuni; pejabat dari Bintuni dan Babo; pejabat pemerintah Sorong dan Jayapura; para menteri serta para pejabat lain di Jakarta; beberapa LSM dari Manokwari, Jayapura dan Jakarta; wakil sejumlah fakultas dalam Universitas Cenderawasih Jayapura; para wakil lembaga penyedia donor, termasuk

¹ Situs BP: www.BP.com/tiap. Komunikasi langsung dengan Panel bisa dilakukan melalui e-mail: TIAP@Tangguh.net.

U.S. Agency for International Development (“USAID”) dan Bank Dunia; serta para kontraktor BP dalam proyek ini.² Panel juga menggunakan jasa penasehat legal independen, dan mendapat akses lengkap terhadap semua informasi yang diperlukan, serta kebebasan total dalam melakukan penilaian dan menyampaikan temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi laporan ini dengan demikian murni berasal dari Panel.

Dengan telah disepakatinya Proeyk dan pembangunan mulai dilaksanakan oleh BP, dan para pemimpin di seluruh Kawasan Teluk Bintuni, Papua dan Jakarta mulai melihat kepentingannya yang berarti bagi kawasan serta bagi Indonesia secara umum. Memang masih terdapat ketidakpastian, atau sejumlah harapan yang kurang realistis juga ketegangan di antara penduduk yang terkena dampak langsung, namun Panel dapat melihat adanya peningkatan kesepakatan khususnya di antara para tokoh masyarakat setempat bahwa Tangguh memiliki kapasitas memberikan keuntungan bagi masyarakat di Teluk Bintuni dan Papua secara umum. Dampak kuntungan ini memang telah mulai tampak.

Keuntungan dari program BP telah terbukti di setiap desa yang terkena dampak Proyek serta di Babo. Proyek-proyek di desa-desa yang terkena dampak langsung termasuk klinik kesehatan; penyediaan sumur-sumur air bersih serta fasilitas penyaringan; fasilitas dan dukungan bagi sekolah-sekolah baru ; pembangunan gereja dan masjid; serta pelabuhan dan dermaga baru.³ Di Babo, pembangunan pendaratan bagi pesawat udara serta perbaikan bandara meningkatkan kegiatan komersial serta pendapatan lokal ; dan di Tanah Merah, Onar dan Saengga, pembangunan perumahan dan fasilitasnya tengah berlangsung. Proyek-proyek ini, juga proses pembangunan di

² Daftar semua individu serta badan yang kami temui sepanjang kerja kami sejak tahun 2002 terdapat dalam Lampiran 1.

³ Lampiran 2 meringkas proyek aksi masyarakat di setiap kawasan desa yang terkena dampak langsung / DTDP. Proyek-proyek ini dipilih oleh masing-masing desa setiap tahun. Dicantumkan pula proyek yang telah dilaksanakan di tahun 2005.

lokasi LNG memperkerjakan sejumlah besar tenaga kerja dari penduduk Papua dan mendatangkan pendapatan cukup besar bagi penduduk dan usahawan di Papua.⁴

Penting dicatat bahwa tidak ada pusat konsentrasi penduduk dekat lokasi Tangguh dan tidak tersedia jalan yang menghubungkan antar kota dan desa-desa di kawasan Teluk Bintuni atau menuju ke lokasi Proyek.⁵ Kawasan ini dipandang oleh sejumlah ahli konservasi sebagai kawasan paling kaya dengan keanakeragaman hayati. Namun bukan berarti kawasan ini tidak diperbolehkan untuk diakses sebelumnya. Meski tidak terdapat banyak kapal pukat udang yang saat ini beroperasi di Teluk Bintuni karena menurunnya jumlah kerja yang dilakukan para nelayan besar Indonesia, fasilitas pengolahan udang masih terdapat di pantai-pantai, juga lokasi-lokasi penebangan kayu / logging, perkebunan kelapa sawit, serta perkebunan sagu di sekitar kawasan ini.⁶

Tentu perubahan terbesar yang terjadi di kawasan dalam tahun ini adalah pembangunan LNG. Proyek ini merupakan proyek pembangunan skala besar, jauh melebihi yang pernah ada di kawasan Kepala Burung. Kebanyakan dari 335 hektar lokasi telah dibuka, ribuan pohon dikumpulkan secara hati-hati dan ditandai dalam area terpisah guna pemakaiannya di masa datang.⁷ Peralatan berat dikerahkan di lokasi, dioperasikan oleh para pekerja terlatih untuk menata kembali 5 juta meter kubik tanah sesuai dengan kontur/lapisan yang diperlukan bagi penyimpanan dan pemrosesan fasilitas LNG. Operasi pengerukan besar-besaran serta pembangunan dermaga berlangsung di tepian pantai, sementara kawasan eksklusif ditetapkan untuk

⁴ Penjelasan tenaga kerja menurut asal dapat dilihat dalam Lampiran 3.

⁵ Telah diajukan usulan pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan Sorong, Manokwari, Bintuni dan Fak-Fak.

⁶ Panel menyaksikan sejumlah kapal pukat yang ditinggalkan begitu saja atau tidak dioperasikan, yang nantinya akan menimbulkan masalah lingkungan hidup.

⁷ Kawasan yang telah dibuka hanya merupakan sebagian dari 3266 hektar dari jumlah total untuk lokasi ini, yang telah diberi batas/pagar. Sisanya – sekitar 2900 hektar – akan dilestarikan sebagai kawasan penyangga alam.

menghindarkan kecelakaan. Model perumahan, tempat rekreasi dan restoran bagi sekitar 5.300 pekerja yang akan dikerahkan di lokasi tambang di tahun 2007 pun telah tersedia. Sejauh ini catatan tingkat keselamatan di lokasi sangat bagus, kontraktor BP dalam bidang Keahlian teknis, Perbekalan dan Konstruksi (Engineering, Procurement and Construction/ EPC) menjelaskan kepada Panel bahwa keselamatan merupakan prioritas utama bagi semua pekerja.⁸

Panel sekali lagi melakukan penilaian kegiatan BP dalam kaitannya dengan norma global yang saat ini berlaku yakni menerapkan praktek-praktek terbaik bagi proyeknya di negara berkembang, yang terus menerus mengalami perubahan. Hal ini meliputi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; Aturan PBB terhadap Tanggungjawab Korporasi Transnasional serta Bisnis terhadap Hak-hak Asasi Manusia; Tuntunan OECD bagi Usaha Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Berkait Penduduk Asli dan Kesukuan di Negara Merdeka; Petunjuk Operasional Bank Dunia terhadap penduduk asli; serta prinsip AS-Inggris yakni Prinsip-Prinsip Sukarela terhadap Keamanan dan Hak Asasi (the “Voluntary Principles on Security”).

Panel tidak melakukan penilaian setiap aspek kesesuaian BP dengan Undang-undang lokal serta nasional di Indonesia, namun mempertimbangkan kewajiban AMDAL serta Rencana Aksi Pengambilan alihan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan atau “LARAP”). Dalam pertemuannya dengan para pejabat lokal, regional dan nasional tidak kami temui adanya keluhan bahwa BP tidak mematuhi kewajiban dan komitmennya di bawah

⁸ Analisa rincian mengenai permasalahan pembangunan dan ketenagakerjaan dapat ditemukan di Bagian IV dalam laporan ini.

kesepakatan AMDAL.⁹ Lebih daripada itu, dalam penilaian terhadap pencapaian BP pada kewajiban LARAP, Panel menemukan bahwa BP telah memenuhi komitmen ini.

Kebanyakan pejabat yang ditemui Panel menyatakan keinginannya agar Proyek segera beroperasi sesegera mungkin. Tak satu pihakpun menyatakan agar proyek ditunda sementara. Panel memahami bahwa menurut jadwal yang saat ini ada rangkaian peralatan operasi pertama di Tangguh hanya akan bisa mulai dijalankan di akhir 2008. Kontrak komersial dengan Terminal LNG Fujian di China, Posco dan K-Power di Korea, dan Sempra di Amerika Serikat cukup untuk melanjutkan dua rangkaian peralatan operasi LNG. Rangkaian peralatan operasi tambahan di lokasi yang sama dimungkinkan dan prasarana untuk menampungnya tengah disiapkan. Kontrak produksi yang ada saat ini menargetkan produksi berakhir tahun 2034, namun dimungkinkan pula untuk dilanjutkan setelah waktu tersebut.

Sejumlah isu serius masih dihadapi oleh Proyek, khususnya dengan masih berlanjutnya ketegangan antara penduduk di kawasan pantai utara dan selatan; dampak politik dan keuangan; kerjasama dan koordinasi dengan pejabat lokal dan propinsi; serta keefektifan komunikasi dengan kawasan yang terkena dampaknya. Dalam poin-poin tersebut Panel menyusun sejumlah rekomendasi berikut, masing-masing dijelaskan lebih luas di bawah.

Gambaran Umum

- **Perasaan perlakuan tidak adil yang dirasakan penduduk kawasan pantai utara belum ditangani secara penuh. Sebagai prioritas, BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni menetapkan program di mana BP dapat mengambil peran dalam mendukung perumahan di pantai utara, penyediaan listrik, atau peningkatan prasarana lainnya yang akan membantu mengurangi adanya perasaan perlakuan tidak adil.**
- **BP, bekerja sama dengan para kontraktor EPC, harus menetapkan prosedur mengidentifikasi para pekerja Papua yang mampu untuk**

⁹ Terdapat klaim bahwa BP tidak memenuhi kewajibannya dibawah kesepakatan adat. LARAP menyimpulkan BP telah memenuhi ketentuan Aturan Menteri Agraria no 5 tahun 1999 serta UU Otonomi Khusus yang menjelaskan *adat* harus dihormati bilaman mungkin, sejauh hal itu sesuai dengan hukum di Indonesia.

mengikuti pelatihan peningkatan menuju jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus untuk prospek jangka panjang. Sebagai tambahan, upaya lebih luas harus dilakukan oleh BP dan para kontraktornya untuk meningkatkan daya beli barang dan layanan di kawasan tersebut.

- Disamping sejumlah inovasi, meningkatkan komunikasi di dalam proyek di kawasan Teluk Bintuni harus tetap menjadi prioritas. Sangat penting bahwa penduduk yang terkena Proyek memahami komitmen serta kemajuan yang dicapai melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan. BP harus memperluas penggunaan radio dan brosur-brosur sederhana, serta mencoba mekanisme baru untuk meningkatkan pemahaman lokal.
- Bupati baru Bintuni telah terpilih, dan Panel menekankan kembali rekomendasi sebelumnya agar BP meningkatkan koordinasinya dengan kabupaten yang baru. BP harus membangun hubungan erat dengan Bupati serta sejumlah pejabat utama di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Hubungan erat juga harus dibentuk dengan pejabat terpilih di Manokwari/Jayapura.

Pembangunan dan ketenagakerjaan

- BP dan para kontraktornya harus melanjutkan upaya menjadikan lokasi LNG sebagai kawasan ekonomi “tanpa uang tunai”. BP juga harus melanjutkan pembayaran gaji pegawai lokal di desa mereka dan gaji pegawai lainnya langsung ke dalam rekening bank mereka di luar lokasi Proyek.
- BP harus mendorong para kontraktor EPC untuk menjelaskan semua peraturan dan persyaratan yang berlaku kepada semua pegawai baru, termasuk penjelasan mengenai hukuman/sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. BP juga harus menjamin semua elemen dalam Tata Peraturan Tingkah Laku yang ditentukan oleh AMDAL diterapkan oleh para kontraktor EPC; dan termasuk dalam peraturan itu satu mekanisme yang memberi ruang bagi para pekerja untuk mengajukan keluhan akan adanya pelanggaran terhadap kondisi kerja atau perlakuan kerja tidak layak untuk diselidiki oleh sebuah tim independen yang terpercaya yang diberi akses pada sistem manajemen Tangguh.
- BP harus mengadopsi mekanisme penyampaian keluhan bagi anggota masyarakat, mempublikasikan serta menjelaskannya secara luas, serta menjamin desa-desa dan pekerja dari desa yang terkena dampak proyek, bahwa mengajukan keluhan tidak akan berakibat buruk bagi mereka; dan akan – bila diperlukan, mendapat perhatian dari pihak penilai independen.
- BP harus terus menerus menjelaskan alasan keselamatan zona kawasan eksklusif dalam proyek ini kepada para nelayan serta pejabat berwenang, dan meningkatkan bantuan peralatan yang tersedia bagi para

nelayan untuk mengganti kerugian bagi mata pencaharian mereka yang diakibatkan oleh adanya proyek pembangunan serta zona larangan melaut.

Keamanan dan Hak-hak Asasi

- **Kursus pelatihan dalam bidang hak asasi harus diterapkan bagi para personil BP dan kontraktor yang terlibat, dalam segala aspek keamanan. Kursus ini harus ditawarkan kepada semua anggota personil polisi yang ditugaskan di Bintuni, Babo serta kawasan Tangguh. BP harus menjamin bahwa muatan yang terdapat dalam pelatihan akhirnya dihormati dan dijalankan.**
- **BP harus terus menekankan kepentingan Aturan Keamanan Lapangan kepada Polda Papua serta kepada semua personil polisi baru yang ditempatkan di Teluk Bintuni. Harus dijelaskan pula semua bahan serta dukungan finansial yang disediakan, serta perlunya transparansi yang ditekankan dalam aturan tersebut.**
- **Prosedur Keamanan Proyek Tangguh harus ditingkatkan dan diperluas, tidak hanya terbatas pada keluhan terhadap personil keamanan; tetapi juga dipublikasikan dan dijelaskan kepada para pekerja serta masyarakat. Proses pengajuan gugatan atau keluhan harus memasukkan kemungkinan penilaian pihak independen dari BP serta harus jelas bahwa hukuman akan diberlakukan kepada siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi.**

Penyampaian Keuntungan Jangka Dekat

- **Perasaan adanya perlakuan tidak adil yang muncul diantara penduduk kawasan pantai utara belum ditangani secara sungguh-sungguh. Sebagai prioritas, BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk menetapkan program di mana BP dapat mengambil peran mendukung pembangunan perumahan di pantai utara, penyediaan listrik atau peningkatan prasarana lainnya, yang akan membantu memperbaiki adanya prasangka perlakuan tidak adil ini.**
- **Program Aksi Masyarakat / KAM tahunan harus dilanjutkan setelah fase pembangunan selesai, untuk menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek khusus yang dipilih oleh wakil-wakil dari setiap desa yang terkena dampak /DTDP.**
- **BP harus bekerja sama dengan Bupati dalam hal menjamin dukungan pendidikan di kawasan DTDP yang diselenggarakan oleh tiga yayasan keagamaan terlaksana secara baik dan terpadu dengan program pendidikan pemerintah setempat. Harus disediakan pula bea siswa untuk belajar di Universitas-universitas di Papua.**
- **BP harus melanjutkan pekerjaan bidang Unit Kesehatan Masyarakat , khususnya dalam hal upaya mengontrol atau mengurangi bahaya malaria serta penularan diare di desa-desa tersebut; juga menangani permasalahan kekurangan gizi pada anak. BP harus juga meningkatkan**

pendidikan penyadaran HIV/AIDS mencakup semua pekerja baru di lokasi LNG dan pangkalannya di Babo.

Koordinasi dan Dukungan bagi Pemerintah daerah

- Dengan telah terpilihnya Bupati Bintuni, Panel menekankan kembali rekomendasi sebelumnya agar BP meningkatkan koordinasinya dengan kabupaten baru. BP harus membentuk hubungan kerja yang kuat dengan Bupati serta pejabat-pejabat utama di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Harus dibangun pula jalur kontak serupa dengan para pejabat di Manokwari/Jayapura.
- Di tingkat daerah, BP harus meningkatkan konsultasinya dengan pemerintah tingkat kecamatan. Pada khususnya, pertemuan berkala harus diadakan dengan para pejabat tingkat kecamatan di Babo dan Randay, memberikan informasi kepada para pemimpin di kawasan itu tentang kemajuan proyek serta memberi kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap pengelolaan Proyek Tangguh.
- BP harus mendukung USAID serta lembaga dana lainnya dalam menjalankan program mereka memperkuat kapasitas kelembagaan diantara pemerintah daerah serta masyarakat sipil di kawasan Kepala Burung; dengan memfokuskan diri pada pembangunan perencanaan strategis, pengelolaan keuangan serta kapasitas anggaran.
- BP harus mendorong dan mendukung langkah lanjutan dari laporan penilaian Bank Dunia baru-baru ini yang secara khusus membahas penyampaian layanan dan pendanaan bagi Kawasan Kepala Burung.

Aliran Pendapatan bagi Kawasan

- Bekerja sama dengan Bank Dunia, BP harus secara hati-hati memonitor aliran masuk pendapatan dari proyek untuk Papua dan Bintuni. BP harus mampu meyakinkan pemerintah Indonesia untuk secara transparan mempublikasikan proyeksi non-komersial, tanda terima, dan pembayaran yang digunakan dari pendapatan proyek Tangguh; serta harus berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi dalam mencapai pemahaman lebih baik mengenai ketepatan jumlah pendapatan dari Tangguh. BP juga harus terus melakukan penilaian/review untuk menjamin agar keuntungan yang sesuai sampai ke tangan penduduk setempat sejak awal pembangunan proyek.

Lingkungan Hidup

- BP harus mengumumkan setiap hasil dari audit AMDAL yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga penilai lingkungan lainnya atau program pemerintah lokal. BP juga harus mempublikasikan segala tindakan yang diambil dalam rangka memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi.
- BP harus mendukung kunjungan-kunjungan ke lokasi LNG yang dilakukan pejabat Lingkungan Hidup dari kawasan regional atau lokal,

serta memberikan tanggapan segera bila muncul tuntutan berkait dengan persyaratan lingkungan hidup yang tidak dipenuhi.

- **BP harus melanjutkan dukungannya terhadap kegiatan LSM lingkungan dalam melestarikan ekosistem Teluk Bintuni serta memperkuat kapasitas lingkungan hidup lembaga-lembaga sipil di Papua.**

Informasi Publik

- **Mengakui bahwa informasi publik di Teluk Bintuni sebagian merupakan tantangan teknis, BP harus memperluas penggunaan metode inovatif dan baru yang dipunyainya dalam cara berkomunikasi, yakni menggunakan radio; serta bereksperimen dengan metode tambahan seperti forum komunitas atau video hiburan dalam menyampaikan isu-isu penting.**
- **BP harus melanjutkan upaya mencari cara publikasi media di tingkat regional dan nasional dengan sejumlah tulisan berkaitan dengan sasaran proyek serta keberhasilan pembangunan masyarakat.**
- **Mengingat bahwa perusahaan ini telah menerapkan cara inovatif yang sangat berharga dalam menjamin agar Proyek memenuhi persyaratan yang ditentukan, BP harus juga mempertimbangkan menugaskan penyusunan sebuah buku mengenai sejarah Proyek yang dapat diterbitkan di saat produksi gas alam ini dimulai.**

II. Perkembangan Politik/Keamanan

Perhatian terhadap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terfokus pada Aceh: pertama pada upaya penyelamatan besar-besaran serta perbaikan kembali setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami; dan yang kedua, keberhasilan pemerintah dalam mencapai kesepakatan mengakhiri konflik sipil berkepanjangan dengan GAM. Meski perjanjian perdamaian ini mungkin tercapai karena tsunami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY”) akhirnya juga mendapat penghargaan politik atas keberhasilan ini. Tsunami juga menunda sejenak perhatian publik pada janji SBY untuk mengadakan reformasi dalam 100 hari pertama sejak menjabat, sebuah jangka waktu yang jelas tidak akan mampu memberi banyak kesempatan bagi berhasilnya komitmen yang dijanjikan.

Perjanjian perdamaian dengan GAM relevan dengan Papua dalam dua pandangan. Pertama, hal itu memberikan preseden penting dengan diakhirinya

kegiatan separatisme di Aceh, termasuk kemungkinan pembentukan partai politik lokal di Aceh, dan yang kedua hal ini memberi kesempatan bagi pemerintahan SBY untuk memusatkan perhatian kepada Papua. Pada gilirannya, hal ini menciptakan harapan di Papua bahwa kemajuan seperti yang dicapai Aceh akan tercipta.

Segera setelah pengumuman perdamaian itu, SBY secara khusus menyatakan, “kebijakan untuk menyelesaikan masalah Papua ... adalah hak otonomi khusus yang merupakan penyelesaian yang adil, komprehensif dan mulia.”¹⁰ Disamping retorika ini, sejumlah orang Papua kehilangan kesabaran mereka karena penerapan Hak Otonomi Khusus berjalan lamban. Maka menurut pandangan Panel, tindakan nyata harus dilakukan segera, karena bila tidak, hanya akan menimbulkan efek sebaliknya pada stabilitas keamanan.

Aspek yang paling menyebabkan perpecahan berkait penerapan Hak Otonomi Khusus adalah pembagian propinsi. Presiden sebelumnya, Megawati Sukarnoeputri, mengeluarkan dekrit bulan Januari 2003 yang membagi Papua menjadi tiga propinsi. Meskipun ini sesuai dengan undang-undang tahun 1999 yang mengesahkan terjadinya pemecahan, Peradilan Perundang-undangan menyatakan bahwa hal ini melanggar Undang-undang yang dikeluarkan tahun 2001 mengenai Hak Otonomi Khusus, yang jelas menyatakan bahwa segala bentuk pemecahan propinsi harus mendapatkan persetujuan Majelis rakyat Papua (“MRP”), yang mewakili aspirasi penduduk asli Papua, yang pada saat itu belum sepenuhnya terbentuk. Namun begitu karena wewenang Peradilan juga karena Propinsi Irian Jaya Barat telah mulai berfungsi, Peradilan menyatakan bahwa propinsi baru tersebut adalah sah dan tetap dapat dilanjutkan keberadaannya.¹¹ Kawasan Tangguh dan Bintuni termasuk dalam propinsi baru ini. Meski keputusan ini menyebabkan berlanjutnya kebingungan dan

¹⁰ “Indonesia Pres Vows To Solve Papua Conflict,” The Jakarta Post (August 16, 2005).

¹¹ Keputusan ini dikeluarkan tak lama sebelum pelantikan SBY.

kontroversi di Papua, SBY menerima warisan permasalahan ini dan berupaya menurunkan ketegangan dengan menerapkan Hak Otonomi Khusus. Dia mengunjungi Papua pada Natal 2004 dan mengumumkan Perintah pembentukan MRP. Perjalanannya yang seharusnya merupakan fokus dari pemerintahannya, disela dengan kejadian tsunami pada hari berikutnya.

Bulan November 2005 MRP akhirnya terbentuk. Ini diikuti dengan kontroversi dan penundaan karena sebagian percaya bahwa proses pencalonan menghasilkan para wakil yang tidak secara murni mewakili warga Papua. Namun begitu MRP kini telah beropreasi, mewakili kepentingan *adat*, kelompok-kelompok agama, serta wanita di seluruh Propinsi Papua. Panel bertemu dengan Ketua MRP Agus Alua, wakil ketua Frans Wospakrik, serta sejumlah anggota beberapa hari setelah mereka dilantik. Panel terkesan dengan keseriusan mereka mencapai tujuan serta tekad mereka menegakkan hak-hak warga Papua.

Juga di tahun 2005, berlangsung sebuah proses pemilihan nasional yang memberi tekanan demokrasi dalam pemerintahan di Indonesia. Untuk pertama kalinya Gubernur tingkat propinsi serta Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga para pemimpin propinsi dan kabupaten bertanggungjawab langsung kepada rakyatnya dan bukan kepada para pemimpin partai di Jakarta. Sebagai buahnya, kini terpilih seorang Bupati bagi Kabupaten Bintuni. Namun karena tertundanya pembentukan MRP serta pertentangan berlanjut mengenai kesahan propinsi Irian Jaya Barat, pemilihan Gubernur Papua dan Irian Jaya Barat tertunda pula beberapa kali dan belum terlaksana.

Yang menarik, pemilihan direncanakan dilakukan di kedua propinsi itu tanggal 28 November, tak lama setelah pembentukan MRP. Para wakil pejabat senior dalam pemerintahan SBY memberi tahu Panel bahwa hal ini akan tetap

berjalan sesuai dengan jadwal. Namun MRP dengan tegas menolak dilakukannya pemilihan di Irian Jaya Barat dan mengancam akan mengundurkan diri secara serentak bila pemilihan tetap dilangsungkan tanpa memberi kesempatan bagi MRP untuk secara resmi mengambil peran menyetujui para calon gubernur yang bersuku asli Papua. Wakil Presiden Yusuf Kalla kemudian turut campur, krisis terhindarkan setidaknya sementara, dan pemilihan ditunda sekali lagi. Namun Wapres Yusuf Kalla telah secara publik menyatakan niatnya mengesahkan propinsi Irian Jaya Barat dan memprosesnya bersamaan dengan pemilihan gubernur¹² sementara pilihan MRP yang dinyatakan secara publik adalah bersatunya Papua¹³. Disamping telah terpilihnya gubernur Papua dan Irian Jaya Barat baru-baru ini, belum jelas apa pemecahan akhir dari masalah ini nantinya.

Keadaan ini dipersulit dengan meninggalnya secara mendadak Gubernur J.P.Salosa yang telah menduduki jabatan selama lima tahun, dan merupakan calon gubernur dari partai Golkar¹⁴. Di adigantikan oleh calon Golkar John Ibo, anggota DPRD yang juga ditemui Panel beberapa kal, dan yang menentang dengan keras penyatuan Papua.

Yang terpenting bagi BP adalah, masih tidak jelas apakah pemisahan propinsi Irian Jaya Barat akan disahkan secara penuh. Sebelum hal ini diselesaikan, masalah ini akan mengakibatkan gangguan utama di segala tingkat pemerintah dan dari sudut pandang kritis yakni pembangunan kapasitas serta pembangunan.

Hasil politik masih nampak kelabu, namun perhatian pemerintahan SBY saat ini dalam hal perlakuan ekonomi bagi Papua telah disampaikan kepada pihak Panel melalui sejumlah pejabat senior pemerintah Indonesia. Hal itu meliputi tiga elemen:

¹² "West Irian Jaya Still in Limbo," The Jakarta Post (February 21, 2006).

¹³ "Council Comes Out Against Partition of Papua for West Irian Jaya Province," The Jakarta Post (February 18, 2006).

¹⁴ *Sekretariat Bersama Golkar* adalah partai politik dari Wakil Preseiden Yusuf Kalla.

1) suatu penyelesaian komprehensif bagi seluruh Papua; 2) penerapan Otonomi Khusus dan 3) unit ekonomi tunggal dengan kawasan administrasi ganda .

Tampaknya akan muncul dua konsekuensi yang berharga dari kebijakan ini. Pertama, Papua akan diperlakukan sebagai unit ekonomi tunggal sehingga pendapatan dari sumber-sumber alam akan disebarkan di seluruh Propinsi.¹⁵ Hal ini akan mengurangi keprihatinan Panel sebelumnya bahwa Irian Jaya Barat akan hanya diberi sisa minimum dari penghasilan proyek tambang dan energi, yang utamanya berbasis di Propinsi Papua, dan bahwa hasil itu hanya akan dicurahkan begitu pendapatan dari Proyek Tangguh mulai mengucur. Namun sebaliknya, aliran pendapatan akan lebih merata karena Propinsi Irian Jaya Barat dan Papua termasuk menerima dana pendapatan dari Otonomi Khusus.

Kedua, bagi Panel semakin jelas bahwa melalui beberapa pertemuan dengan pejabat pemerintah serta laporan Bank Dunia, “Analisa Anggaran Pembelanjaan Papua: Penyampaian Pendanaan Regional serta Layanan di Kawasan Paling Terpencil Indonesia ” (“Laporan Bank Dunia ”)¹⁶, bahwa begitu pendapatan mulai mengalir dari Tangguh, pendapatan ini akan dibagikan ke kabupaten dan kota, serta pemerintah propinsi. Pembagian ini akan mengurangi kekhawatiran Panel karena pemerintah propinsi akan diberi kebebasan untuk menggunakan sebagian besar dari pendapatan yang dihasilkan Tangguh. Harus dicatat bahwa Bintuni sebagai Kabupaten yang memproduksi, akan menerima setidaknya 12% dari pendapatan setelah pajak, yang berarti peningkatan tajam dari anggaran yang saat ini ada. Seperti dibicarakan nanti, Panel merekomendasikan bahwa BP mendukung pemerintah Bintuni dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas serta pengawasan keuangan sehingga

¹⁵ Lihat Bagian VIII, Aliran pendapatan Bagi Kawasan untuk rincian detil mengenai bagaimana pendapatan Tangguh akan dibagikan. Lihat juga Lampiran 4.

¹⁶ Laporan Bank Dunia dipublikasikan Oktober 2005 dan tersedia di situs Bank Dunia www.worldbank.org/id.

mampu lebih baik dalam menangani pendapatan yang masuk dalam jumlah besar ini secara efektif dan transparan.

Berkenaan dengan isu keamanan dan hak asasi, tahun ini terjadi sejumlah bentrokan antara pasukan TNI dengan tersangka kelompok separatis di luar kawasan Kepala Burung, utamanya di dataran tinggi Papua. Terdapat pula dugaan bahwa TNI membakar 371 rumah di kawasan Puncak Jaya, di Pegunungan Tengah, serta menyebabkan 6.000 penduduk mengungsi ke hutan-hutan di mana mereka akhirnya bersembunyi.¹⁷ Pemerintah Indonesia membantah dugaan ini. Selain itu, meski belum diterapkan saat ini, TNI telah menunjukkan niatnya menempatkan divisi Komando Startegis Angkatan Darat (“KOSTRAD”) serta terdapat laporan yang belum dapat dikonfirmasi mengenai adanya penempatan TNI di Propinsi ini.¹⁸

Secara internasional hubungan antara militer dengan AS meningkat dalam beberapa hal, sebuah sinyal yang berarti bahwa AS percaya bahwa normalisasi militer akan memelihara proses reformasi. Bulan Februari AS memulihkan program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional (International Military Education and Training / IMET), berdasar pada temuan bahwa Indonesia telah bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan terhadap dua warga negara AS dan seorang warga Indonesian di Timika;¹⁹ Bulan Mei hubungan Perdagangan Militer Luar Negeri Asing telah kembali; dan bulan Desember pembatasan Pendanaan Militer Luar Negeri

¹⁷ Lihat laporan University of Sydney “Genocide in West Papua,” Sydney Morning Herald (August 19, 2005).

¹⁸ Penilaian keamanan dan hak asasi ada dalam Bagian V di bawah.

¹⁹ Lihat Laporan Panel ketiga, Februari 2005 (the “TIAP Third Report”), hal.11. Tanggal 11 January 2006, sejumlah tersangka penembakan Timika ditahan di Jayapura. Antonius Wamang, yang menjadi target AS serta delapan orang lainnya dikenai dakwaan pembunuhan. Mereka akan diajukan ke pengadilan di Indonesia. Albert Rumbekwan, pengacara para tersangka mengatakan delapan orang tersebut merupakan anggota OPM. “Mereka diperintah oleh pemimpin OPM Kelly Kwalik menyerang anggota TNI dekat lokasi tersebut,” katanya, The Jakarta Post (Januari 17, 2006). Sejumlah tersangka mengatakan mereka tergiur janji agen FBI yang menyatakan akan membawa mereka ke AS. Wamang mengakui penembakan pada iring-iringan kendaraan itu, namun dia juga mengatakan dia melihat ada tiga orang dengan seragam militer di lokasi, dan bahwa dia diberi amunisi yang digunakan dalam serangan oleh seorang Sersan Indonesia. The Financial Times (Januari 17, 2006).

dicabut. Namun begitu sejumlah anggota Konggres Amerika tetap berpandangan skeptis terhadap reformasi yang dilakukan TNI dan khawatir akan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi oleh TNI di Papua.

III. Gambaran Umum

Meski secara umum berbasis pada harapan, namun berkait dengan kinerja BP, dukungan bagi Proyek baik di Papua maupun di Jakarta sangat luas. Para pemimpin nasional sangat ingin agar Proyek berjalan sebelum Pemilu berikut berlangsung di tahun 2009; para pejabat regional dan lokal secara umum sangat puas dengan kinerja BP dan sangat menanti hasil yang akan diperoleh, pembangunan, serta pekerjaan yang akan mengalir di kawasan kekuasaan mereka. LSM yang bergerak di bidang hak asasi serta bidang lingkungan hidup mendukung kesempatan pembangunan kawasan dan meski secara hati-hati menyatakan optimis terhadap niat BP memenuhi komitmennya sejauh ini.

Isu keamanan dan peran TNI dan polisi masih menjadi kekhawatiran utama. Namun telah ada penerimaan yang luas dari berbagai pihak terhadap konsep BP mengenai pengamanan berbasis masyarakat yang kini mulai diterapkan, termasuk di kalangan masyarakat, TNI, polisi, pejabat lokal dan regional, serta LSM. Sesuatu yang semula dimulai sebagai konsep kontroversial dan diyakini sulit untuk diterapkan, akhirnya telah ternyata dan diterima sebagai bagian dari Proyek. Salah satu aspek yang paling dianggap paling berharga adalah, hampir seluruh pasukan keamanan swasta yang ada di Papua dipekerjakan untuk menjaga lokasi LNG serta base camp-nya. Mereka yang direkrut mengikuti pelatihan isu hak asasi, dan ini mendapatkan pujian dari Menteri Pertahanan, Manajer Proyek, para pejabat setempat serta berbagai pihak lainnya. Keuntungan yang didapat dari Proyek telah mulai nampak di setiap desa yang terkena dampak langsung serta kota-kota di kawasan

Proyek. Seperti dinyatakan dalam laporan sebelumnya, Proyek Aksi Masyarakat (PAM), yang dipilih setiap tahun oleh setiap desa, memasukkan program klinik kesehatan, fasilitas air bersih, dermaga baru, peningkatan pendidikan serta pembangunan masjid dan gereja. Perlu dicatat bahwa Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh telah mencapai kemajuan berarti dalam mengurangi bahaya malaria dan dalam memberantas penyebaran diare, yang merupakan penyebab utama kematian bayi dan anak di kawasan ini.²⁰ Sebagai tambahan, pelatihan penyadaran HIV/AIDS makin meluas dan program kesehatan ibu dan anak berjalan di semua desa. Peningkatan daya beli serta layanan meski substansial masih belum meningkat secara nyata sejak fase sebelum pembangunan. Upaya lanjutan serta pembukuan detil harus dilakukan untuk memonitor peningkatan kemampuan daya beli masyarakat lokal.

Ketegangan antar agama di Teluk Bintuni tampak cukup minimal. Salah satu pemimpin agama menyatakan kepada Panel bahwa keseimbangan religi terjadi di kawasan itu dan akan dijaga untuk seterusnya seperti itu. Dia beserta sejumlah warga lainnya sangat lega BP tidak berpihak, sebagaimana yang dinyatakan dalam nota kesepakatan untuk meningkatkan pendidikan di desa-desa kawasan yang terkena dampak langsung dengan tiga organisasi sosial dengan latar belakang berbeda agama.²¹

Berkurangnya jumlah ikan di Teluk Bintuni yang merupakan kekhawatiran sebelumnya, kini tidak lagi menjadi kekhawatiran utama. Jumlah persediaan ikan menurun karena kegiatan pemukatan besar-besaran di Teluk ini, namun pengeoperasian utama yakni Jayanti, telah tidak lagi beroperasi sehingga berakibat pada mulai meningkatnya jumlah persediaan ikan.

²⁰ Skema yang menggambarkan kemajuan penurunan angka penderita diare serta kematian karena malaria terdapat pada Lampiran 5.

²¹ Lihat Bagian VI di bawah.

Ini jelas membawa keuntungan bagi nelayan setempat yang kini mengalami tahun panen gemilang. Tentu saja pelestarian perikanan di Teluk Bintuni – mata pencaharian utama penduduk DTDP – akan tetap menjadi prioritas. Pengawasan jumlah persediaan ikan oleh Universitas Papua di Manokwari, melalui sebuah studi yang sangat bagus, harus tetap berlanjut dengan dukungan BP. Pejabat lokal dan regional harus mempertimbangkan menetapkan peraturan untuk membatasi penjarangan ikan secara berlebihan.

Disamping pencapaian keberhasilan tersebut di atas, sejumlah keluhan dan tantangan tetap ada. Hal hal tersebut meliputi:

1. Perasaan adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan sejumlah penduduk kawasan Pantai Utara Penduduk desa-desa di kawasan utara merasa iri terhadap perkembangan yang terjadi di kawasan pantai selatan di Tanah Merah, Saengga dan Onar, di mana perbaikan-perbaikan tengah berlangsung. Meski Panel menjumpai hanya sedikit perasaan militansi diantara para pemimpin di kawasan utara, tetap saja hal ini bisa dirasakan. Panel telah merekomendasikan agar BP berkoordinasi dengan *Bupati*, dalam menetapkan dana atau program mendukung pembangunan bagi masyarakat di kawasan utara, termasuk kemungkinan pembangunan perumahan, penyediaan listrik serta peningkatan prasarana lainnya. Program semacam ini tidak ditetapkan sebelumnya sebagian karena belum terpilihnya *Bupati*. Kini dengan telah berfungsinya pemerintahan lokal, BP harus membantu perkembangan program ini.

2. Kesempatan bagi penduduk asli Papua. Kebanyakan pemimpin lokal dan regional menempatkan pelatihan dan penyediaan kesempatan kerja sebagai tujuan utama. Sejauh ini para kontraktor BP telah memenuhi kewajibannya

memperkerjakan penduduk desa serta warga Papua.²² Namun, karena jumlah warga Papua yang memiliki keahlian sangat terbatas, kebanyakan pekerjaan ini bersifat jangka pendek dan memiliki potensi minim pada kemungkinan peningkatannya. Ada sejumlah contoh pekerja dari desa yang terkena dampak proyek yang memperlihatkan potensi dan dipromosikan menuju peran supervisor. BP dan para kontraktornya harus terus memberikan prioritas pada pelamar dari daerah lokal, dan harus tetap mencoba menerapkan pelatihan dan peningkatan pada pekerjaan level lebih tinggi dengan prospek jangka panjang bagi para pekerja Papua yang menunjukkan motivasi dan bakat sesuai. Sebagai tambahan, upaya lebih luas harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daya beli atas barang dan layanan di kawasan ini.

3. Komunikasi dalam kawasan Teluk Bintuni. BP telah mencapai kemajuan yang cukup berarti di bidang ini, meski menghadapi berbagai rintangan. Baik radio lokal maupun tabloid bulanan telah mengalami kemajuan dibanding upaya sebelumnya. Namun tingkat pemahaman akan komitmen Proyek atau isu yang berdampak langsung pada penduduk setempat seperti zona eksklusif kawasan dermaga LNG masih tetap rendah. Upaya komunikasi perlu diperkuat dan cara lain perlu dicoba. Panel BP untuk terus menggunakan cara-cara yang mudah dipahami dengan menggunakan brosur sederhana berkait topik tunggal seperti yang telah mulai digunakan; serta memakai radio secara lebih interaktif; mengembangkan penggunaan video dengan isu tertentu dengan disisipi sejumlah komponen hiburan yang dapat

²² Jumlah tenaga kerja total serta para subkontraktornya terdapat dalam Lampiran 3. Sesuai dengan kontraknya dengan BP, para kontraktor EPC diwajibkan mempekerjakan penduduk Papua dalam persentase khusus. Dalam kategori “tenaga biasa” dan “tenaga ahli” para EPC kontraktor dapat memenuhi targetnya, dan dalam beberapa kasus, melebihi persentase yang diperlukan. Namun dalam dua kategori para Kontraktor EPC mengalami kekuarangan yakni dalam hal para kontraktor EPC wajib mempekerjakan penduduk Papua untuk 93% dari pekerjaan semi-ahli, dan hanya mampu mendapatkan sejumlah 81% sampai awal Desember 2005. Untuk pos tenaga kerja sebagai supervisor, kontraktor EPC wajib mempekerjakan penduduk Papua sejumlah 6%, namun sampai awal Desember hanya mampu mendapatkan 5%. Namun secara umum para kontraktor EPC melewati jumlah minimum kontrak, dengan mempekerjakan 642 orang Papuan dari jumlah yang diperlukan yakni hanya 475.

dimainkan di desa-desa kawasan yang terkena dampak langsung sebagai bagian dari 'road show' Tim Hubungan Masyarakat .

4. Konsultasi dan Koordinasi dengan Pejabat Setempat. Koordinasi tetap menjadi masalah. Disamping optimisme Panel tahun lalu bahwa pembentukan Kabupaten Bintuni akan mempermudah koordinasi, proses pemilihan berkepanjangan dalam tahun ini menghambat tujuan ini. Kini dengan pemimpin terpilih yang baru, koordinasi lebih efektif mungkin diadakan dan ini akan tetap menjadi hal yang penting. BP harus memantapkan hubungan erat dengan pejabat-pejabat kunci di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan; dan bertemu secara berkala untuk berkonsultasi dan mengkoordinasikan kegiatan mereka . BP juga harus membangun jalur kontak serupa dengan pejabat propinsi Manokwari/Jayapura.

IV. Pembangunan dan Ketenagakerjaan.

Lokasi LNG merupakan lokasi pembangunan skala luas yang telah dibuka dan dikembangkan sehingga mampu menampung fasilitas proyek serta peralatan berat yang digunakan. Lahan yang dibuka – sekitar 335 hektare – dikelilingi kawasan hutan penyangga perimeter dan terdapat pagar pembatas di tepi kawasan penyangga tersebut. Mesin-mesin raksasa super modern dioperasikan oleh tenaga ahli dalam membongkar lapisan tanah, mengumpulkan batang-batang pohon, membangun jalan baru dan memfasilitasi keseluruhan pembangunan. Ribuan pohon yang ditebang disusun rapi di dekat lokasi. Menurut pemahaman Panel, batang-batang kayu ini disimpan untuk kemungkinan penggunaannya dalam proses pembangunan selanjutnya, seperti pembangunan perumahan di kawasan Teluk Bintuni. Panel mendesak dengan sangat agar BP bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk menggunakan sumber daya alam ini secepat mungkin.

Di lepas pantai, alat pengeruk raksasa serta peralatan lainnya mempersiapkan wilayah untuk membangun dua dermaga panjang serta tempat menaruh pipa dari platform gas lepas pantai. Kawasan Teluk yang mengalami pembangunan Proyek dibatasi dengan pelampung sebagai kawasan zona eksklusif, sehingga perahu-perahu nelayan atau kapal komersial lainnya tidak memasuki kawasan. Sesuai dengan AMDAL, BP melakukan upaya penuh dalam mengurangi dampak bagi hutan yang ada di sekitar kawasan, menjamin terjaganya lapisan subur tanah bagian atas, serta melakukan penanaman kembali di kawasan yang telah dibuka namun tak diperlukan untuk pembangunan fasilitas.

Terdapat sekitar 2.700 pekerja; dan jumlah tenaga kerja ini akan meningkat menjadi 5.300 di tahun 2007. Sekitar 52% pekerja berasal dari Papua, di mana 25% di antaranya berasal dari desa-desa yang terkena dampak langsung Proyek. Termasuk diantaranya adalah 266 orang sebagai penjaga keamanan swasta, hampir semuanya warga Papua.²³ Semua pekerja kecuali yang tinggal di dekat kawasan desa-desa yang terkena dampak langsung, ditampung di perumahan tidak jauh dari perimeter proyek. Para pekerja ini tidak dibayar di tempat kerja, dan gaji mereka masuk dalam rekening di bank lokasi tempat asal mereka mendaftarkan diri, atau bagi pekerja yang berasal dari desa yang terkena dampak langsung proyek, uang tersebut dibayarkan di desa mereka. Semua pembelian yang dilakukan di dalam proyek tidak menggunakan uang tunai, dana disediakan melalui penggunaan sebuah kartu dan pembayarannya dilakukan dengan memotongnya dari gaji mereka. Alkohol dan obat-obat terlarang dilarang di lokasi, dan sejauh ini belum ditemukan kasus adanya pelanggaran

Kebanyakan pekerja di proyek ini disewa oleh kontraktor atau subkontraktor EPC. BP tidak memiliki kontrol langsung terhadap tindakan para kontraktornya,

²³ Tabel yang menunjukkan asal tenaga kerja sampai Desember 2005 terdapat dalam Lampiran 3.

sehingga harus dilakukan langkah pengembangan serta menerapkan mekanisme untuk menjamin agar perlakuan layak bagi pekerja serta dihormatinya asas hak asasi penduduk desa kawasan Proyek. Panel melakukan pembicaraan mendalam menangani isu ini dengan para kontraktor EPC. Para kontraktor menyediakan pelatihan awal bagi para pekerja, di mana semua aturan dan tata tingkah laku yang harus dipatuhi di lokasi LNG dijelaskan, dan memasang aturan tersebut di seluruh kawasan lokasi. Para kontraktor juga menyampaikan mereka memiliki sistem penyampaian keluhan untuk menampung serta mencari penyelesaian keluhan yang disampaikan para pekerja berkait segala bentuk ketidakpuasan akan kondisi kerja. Ini merupakan langkah positif. Namun penting BP menjamin agar semua aspek prinsip dasar tata tingkah laku yang ditentukan oleh AMDAL diterapkan, dan lebih jauh adalah segala bentuk hukuman yang mungkin diterapkan dijelaskan kepada para pekerja. Untuk menjamin terjadinya penyesuaian penuh, BP harus melembagakan sebuah mekanisme untuk melakukan audit terhadap para kontraktor EPC akan penerapan kewajiban yang ditentukan AMDAL.

Secara terpisah BP telah menyusun rancangan mekanisme penyampaian keluhan yang segera akan dilembagakan, yang menerapkan sebagian dari rekomendasi Panel sebelumnya. Ini akan menjadi sebuah mekanisme yang lebih resmi dalam melakukan pengawasan, pelaporan serta penyelidikan terhadap tuntutan/gugatan; termasuk kemungkinan pelanggaran kebijakan Tangguh. Mekanisme ini harus dijelaskan kepada semua anggota masyarakat, termasuk para pekerja lokal, harus mengetahui bahwa pengajuan keluhan akan merupakan prosedur rahasia, dan bahwa tidak akan ada konsekuensi buruk yang akan terjadi. Sebagai tambahan, segala bentuk tuntutan terhadap pelanggaran hukum serius harus mendapat perhatian segera dari manajemen senior Tangguh, yang harus terlibat dalam

memutuskan apakah individu atau subkontraktor harus diberi hukuman atas pelanggaran kebijakan Tangguh itu.

BP serta para kontraktor EPC telah membentuk kantor-kantor rekrutmen tenaga kerja di empat lokasi di kawasan Kepala Burung -- yakni di Manokwari, Sorong, Fak-Fak dan Bintuni – dan mengiklankan kesempatan kerja di kawasan tersebut. Sejauh ini, dengan menyediakan kantor rekrutmen tenaga kerja di luar lokasi untuk merekrut para pekerja warga Papua mampu membatasi perpindahan ke dalam seperti yang dikhawatirkan terjadi di lokasi LNG.²⁴ Sejauh ini hanya terdapat sejumlah kecil pemukim baru yang berada di sekitar desa-desa dekat lokasi yang mencari pekerjaan, dan tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran hukum yang muncul dekat kawasan ini. Namun begitu terjadi peningkatan jumlah penduduk non Papua yang mencari pekerjaan dan melakukan usaha di Bintuni.²⁵

Upaya membentuk lokasi kerja sebagai kawasan ekonomi tanpa uang tunai menghadapi sejumlah permasalahan. Sejumlah pekerja Papua menolak gagasan ini karena mereka tidak memiliki nomor rekening bank di mana mereka dapat menyimpan dan mengambil uang dengan mudah, sehingga lebih memilih menerima gaji dalam bentuk tunai di lokasi LNG. BP berupaya mendapatkan fasilitasi bank masyarakat di Babo untuk tujuan ini, namun permohonannya ditolak oleh pihak bank. Namun pada waktu kunjungan Panel, sebuah sistem telah dikembangkan untuk membayar gaji pegawai yang bersala dari desa yang terkena dampak proyek secara tunai di desa mereka. Dibentuk sebuah lembaga kredit bersama di beberapa desa yang terkena dampak untuk mendorong sistem penabungan. Begitu diterapkan, sistem ini

²⁴ BP dan para kontraktornya menyandarkan diri data diri individu yang disediakan para calon pekerja untuk menentukan apakah orang tersebut benar berasal dari Papua. Tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut akan hal ini.

²⁵ Lihat *The Manokwari Post*, (Desember 12, 2005) (dikutip dari the Van Zorge Papua Report, No. 18, Vol. VI, Desember 18, 2005).

akan sejalan dengan yang ditentukan AMDAL dan akan mencapai tujuan BP yakni kawasan kerja tanpa uang tunai, yang didukung kuat oleh Panel dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal.

Dalam kasus terpisah, potensi gangguan terhadap kehidupan nelayan kini muncul di permukaan, dengan mulai diterapkannya zona kawasan eksklusif untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan di dekat kawasan pembangunan dermaga. Tentu saja pembatasan ini perlu dilakukan, namun jelas membawa akibat pada munculnya keluhan. Penting bahwa BP mensosialisasikan perlunya pemberlakuan zona kawasan eksklusif kepada desa-desa yang terkena dampak serta para pemimpin di kawasan tersebut. Penting pula melanjutkan penyediaan peralatan bagi para nelayan tersebut untuk mengganti gangguan yang disebabkan oleh adanya kawasan eksklusif ini. Sebelumnya Panel telah merekomendasikan BP untuk memberikan dukungan perahu nelayan serta peralatan yang lebih modern serta menyediakan gudang pendingin. BP telah menerapkan sebagian dari rekomendasi ini, beserta kursus pemeliharaan peralatan motor tempel ini. Program ini menunjukkan keberhasilan namun BP harus lebih memfokuskan pada pemberian bantuan pada penyediaan fasilitas gudang pendingin sebagai penyimpanan di semua desa yang terkena dampak karena hal ini dapat secara nyata mendukung peningkatan pendapatan para nelayan setempat.

Atas permintaan para pemimpin adat, BP membangun sebuah tempat bagi sejumlah lokasi batuan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat yang berada di dalam lokasi proyek. BP juga mengupayakan agar batuan tersebut dipindahkan ke lokasi baru dan berpartisipasi dalam upacara adat merayakan keberhasilan pemindahan ini.

Rekomendasi

- **BP dan para kontraktornya harus melanjutkan upayanya agar lokasi LNG berfungsi seluas mungkin menjadi kawasan ekonomi ‘tanpa uang tunai’. BP juga harus membayar gaji pegawai lokal di desa mereka , dan membayar gaji pekerja lainnya di luar lokasi.**
- **BP harus mendorong para kontraktor EPC untuk menjelaskan semua peraturan dan persyaratan yang berlaku kepada semua pegawai baru, termasuk penjelasan mengenai hukuman/sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. BP juga harus menjamin semua elemen dalam prinsip dasar tata tingkah laku bagi para pekerja yang ditentukan oleh AMDAL diterapkan oleh para kontraktor EPC; dan bahwa dalam peraturan itu termasuk mekanisme yang memberi ruang bagi pengajuan keluhan oleh para pekerja atas adanya pelanggaran kondisi atau perlakuan di tempat kerja untuk diselidiki oleh individu yang independen dan terpercaya yang diberi akses pada sistem manajemen Tangguh.**
- **BP harus mengadopsi mekanisme penyampaian keluhan bagi anggota masyarakat, mempublikasikan serta menjelaskannya secara luas, serta menjamin desa-desa, termasuk pekerja dari desa yang terkena dampak proyek secara langsung, bahwa mengajukan keluhan tidak akan berakibat buruk bagi mereka, dan akan, bila diperlukan, mendapat perhatian dari pihak penilai independen.**
- **BP harus terus menerus menjelaskan alasan keselamatan zona kawasan yang terlibat dalam proyek ini kepada para nelayan serta pejabat berwenang, dan pada saat yang sama meningkatkan bantuan peralatan yang tersedia bagi para nelayan untuk mengganti gangguan bagi mata pencaharian mereka akibatnya adanya proyek pembangunan serta zona larangan melaut.**

V. Keamanan dan Hak-hak Asasi

Isu-isu berkaitan dengan keamanan dan asas hak asasi merupakan hal yang paling peka dalam Proyek ini. Selama tahun-tahun terakhir penerapan pengamanan berbasis masyarakat telah berlangsung di lokasi LNG dan menunjukkan hasil yang baik. Satuan pengaman Proyek Tangguh menjaga lokasi LNG serta base camp di Babo. Semua petugas Satpam menerima pelatihan dan kursus bidang hak asasi yang dikoordinasi ELSHAM.²⁶ Namun sejauh pengetahuan Panel belum semua personil

²⁶ LSM-LSM berikut ini ambil bagian dalam pelatihan hak asasi: ELSHAM Papua, LBH Jayapura, LP3BH Manokwari, Kontras Papua, Komnas HAM Papua, UNCEN (Human Rights Center), ALDP dan LP3A Papua.

pengamanan yang bekerja dalam BP mengikuti kursus ini. Seharusnya semua personildari segala tingkatan mengikuti kursus ini.

Konsep pengamanan berbasis masyarakat tampaknya diterima dengan baik oleh TNI, polisi, para pemimpin setempat serta masyarakat. Tuntunan Keamanan Lapangan²⁷ yang diterapkan di BP dan di Kepolisian Papua tahun lalu,²⁸ mewajibkan berbagai pihak memegang prinsip dasar hak asasi dan memasukkan Prinsip Sukarela dalam bidang Keamanan (The Voluntary Principles on Security), nampaknya dipahami oleh Kepla Polisi di Babo, Bintuni dan Jayapura, dan diterapkan dengan senyatanya. Meski tahun ini Panel tidak mendapat kesempatan bertemu dengan Komandan TNI di Papua, tidak terlihat adanya kemungkinan bahwa dia tidak melanjutkan kebijakan komandan sebelumnya, yakni mendukung penuh gagasan pengamanan berbasis masyarakat, begitu pula dengan Menteri Pertahanan sendiri.

Tidak terdapat kejadian di lokasi LNG yang memerlukan campur tangan polisi sejauh ini. Memang terjadi setidaknya satu insiden kekerasan berkaitan dengan perekrutan pekerja lokal yang dilakukan oleh Proyek. Protes ini berhasil ditangani oleh satuan pengaman swasta dari proyek, polisi dipanggil namun saat itu tidak ada yang datang. Tidak ada tuduhan terjadinya penggunaan kekerasan berlebihan atau pelanggaran hak asasi. Para pemimpin setempat menginformasikan kepada Panel bahwa protes tersebut dimulai oleh para pendatang dan bukan pendudukan lokal Papua yang tidak merasa memiliki keluhan semacam itu.

Panel berharap penempatan polisi di kawasan teluk Bintuni akan meningkat begitu jumlah tenaga kerja di lokasi pembangunan bertambah. Dengan maksimum jumlah tenaga kerja 5.300 orang, lokasi LNG akan menjadi salah satu pusat pemukiman paling besar di Teluk Bintuni. Kalau sebuah insiden terjadi di lokasi

²⁷ Tuntunan Keamanan Lapangan tersedia di situs BP, www.bp.com.

²⁸ Lihat Laporan Ketiga TIAP, hal. 14, 23-26.

LNG, di kawasan yang berada agak jauh di sekitar lokasi LNG Babo atau Bintuni, akan sulit dan makan waktu bagi polisi untuk mencapai lokasi, maka konsekuensi ini harus dilakukan, sesuai dengan yang terdapat dalam Tuntunan Keamanan Lapangan. Maka besar kemungkinan polisi akan meningkatkan jumlah personilnya tempat ini. Sejauh ini belum ada rencana khusus yang diumumkan. Begitu pula BP belum menerima permintaan dari pihak Kepolisian dalam bentuk dukungan dana atau bantuan lain untuk pembiayaan pengamanan lokasi (kecuali pembayaran harian /per diem bagi pejabat polisi yang telah ditempatkan di Saengga sejak beberapa waktu sebelumnya atas permintaan penduduk desa). Kalau muncul permohonan ini, tanggapan BP harus konsisten secara jelas dengan syarat yang tercantum dalam Tuntunan Keamanan Lapangan, dan segala bentuk pembayaran harus jelas. Lebih jauh, sesuai dengan Prinsip-prinsip Sukarela ('the Voluntary Principles'), BP harus mampu menawarkan dukungan pelatihan asas hak asasi bagi para pejabat polisi di kawasan Teluk Bintuni, serta pejabat polisi lain di wilayah komando Papua.

Terdapat kekhawatiran diantara penduduk Papua mengenai kemungkinan penempatan pasukan TNI dan Angkatan Laut Papua, khususnya di Sorong, Manokwari dan Teluk Bintuni. Kekhawatiran utama berkait dengan penempatan pasukan KOSTRAD baru di Papua, juga mungkin penempatan beberapa unit di Sorong. KOSTRAD, bertugas mengawasi kesiapan operasional diantara semua komando serta melaksanakan pengamanan batas negara serta operasi keamanan pada tingkat strategis. Pada saat ini KOSTRAD tidak memiliki pos di kawasan Timur Indonesia. Kalau sebuah Komando KOSTRAD dibentuk di Papua, sangat penting menjamin agar penempatan ini tidak berakibat pada sistem pengamanan berbasis masyarakat atau secara umum pada Proyek Tangguh.

Sesuai dengan komitmen Proyek pada the Voluntary Principles di bidang keamanan dan Hak Asasi, BP menerapkan Prosedur Keamanan Proyek Tangguh: Mengelola Gugatan Pelanggaran atau Kejadian Terkait dalam Kerangka Keamanan (= the “Security Procedure”). Prosedur ini telah dicantumkan dalam situs BP, mensyaratkan adanya review segera dan menyeluruh terhadap segala bentuk gugatan pelanggaran hak asasi yang dilakukan publik atau pihak keamanan dalam area operasi Tangguh. Prosedur keamanan ini memenuhi kewajiban BP di bawah Prinsip-prinsip Sukarela/ the Voluntary Principles, namun dapat ditingkatkan dan diperluas dalam beberapa cara guna menerapkan norma lain berkait isu hak asasi, termasuk Tuntutan OECD Bagi Perusahaan Multinasional serta Kesepakatan Hak Asasi Manusia PBB.²⁹ Panel memberi rekomendasi agar BP memepertimbangkan beberapa modifikasi berikut:

- Prosedur Keamanan diterapkan hanya pada pelanggaran yang berkaitan dengan personil keamanan Proyek. Di dalamnya harus termasuk mekanisme keluhan mengenai adanya pelanggaran hak asasi yang dilakukan siapa pun yang dipekerjakan oleh BP, para kontraktornya atau subkontraktor.
- Sejauh ini tidak ada komponen publikasi. Mencantumkan Prosedur Keamanan di situs memang berguna, namun hal ini tidak mampu meraih semua pihak yang terlibat serta penjelasan bagaimana ini seharusnya digunakan. BP harus menjamin bahwa prosedur ini diketahui secara luas oleh para pekerja serta masyarakat Teluk Bintuni, melalui pemberian informasi lewat media yang dirancang bisa meraih seluruh lapisan masyarakat.
- Segala aspek penyelidikan serta ulasan akan dilakukan personil BP. BP mungkin perlu menerapkan bahwa penyelidikan juga dilakukan pihak dari non-pekerja BP, sehingga bisa dinilai obyektif dan tidak memihak. Ini penting khususnya bila keluhan berkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pekerja BP.

²⁹ Sesuai dengan kesepakatan PBB yakni: ‘the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights’; ‘the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’; ‘the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination’; ‘the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women’; dan ‘the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families’.

- Dalam Prosedur Keamanan tidak tercantum batasan waktu dalam pengambilan tindakan setelah pengajuan keluhan/ gugatan. BP harus memasukkan batasan waktu bagi pengajuan gugatan sehingga bukti dan/atau pengumpulan bukti dimungkinkan. Juga harus dicantumkan diterapkan batasan waktu atau tuntunan mengenai pengeluaran keputusan , khususnya pada dugaan gugatan yang memerlukan tanggapan segera.
- Kecuali pemberitahuan pada pihak pemerintah, Prosedur Keamanan tidak memberikan tindakan/sanksi terhadap personil yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi. Setidaknya, prosedur ini harus menerapkan sanksi penghentian sementara bagi orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap segala bentuk posisi atau kekuasaan terhadap penggugat, saksi atau keluarga mereka. Juga, harus tersedia tindakan disipliner terhadap siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak asasi. Lebih jauh BP harus secara periodik melakukan penilaian terhadap keluhan yang masuk untuk melihat terhadap siapa keluhan itu diajukan; hakikat dari keluhan yang ada, serta apakah informasi ini menunjukkan keefektifan dari personil keamanan.

Rekomendasi

- **Kursus pelatihan dalam bidang hak asasi harus diterapkan bagi para personil BP dan kontraktor yang terlibat dalam segala aspek keamanan. Kursus ini harus ditawarkan kepada semua anggota personil polisi yang ditugaskan di Bintuni, Babo serta kawasan Tangguh. BP harus menjamin bahwa muatan yang terdapat dalam pelatihan akhirnya dihormati dan dijalankan.**
- **BP harus terus menekankan kepentingan Tuntunan Keamanan Lapangan kepada Polda Papua serta kepada semua personil polisi baru yang ditempatkan di Teluk Bintuni. Harus dijelaskan pula batasan dukungan finansial dan dukungan bentuk lain, serta perlunya transparansi absolut yang ditetapkan dalam Tuntunan tersebut.**
- **Prosedur Keamanan Proyek Tangguh harus ditingkatkan dan diperluas, tidak hanya terbatas pada keluhan terhadap personil keamanan Proyek; tetapi juga harus dipublikasikan dan dijelaskan kepada para pekerja serta masyarakat. Proses mempertimbangkan gugatan atau keluhan harus memasukkan adanya penilaian dari pihak independent serta harus jelas ada hukuman yang diberlakukan kepada siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi.**

VI. Penyampaian keuntungan jangka dekat

Dalam laporan terdahulu Panel menekankan pentingnya penyampaian keuntungan jangka dekat bagi kawasan, khususnya karena sebgayaan besar dana dari Otonomi Khusus tertunda. Dalam berbagai hal, keuntungan Proyek telah

tersampaikan, baik dalam arti lapangan kerja maupun pembangunan masyarakat. Terjadi pula peningkatan prasarana di berbagai desa yang terkena dampak. Kebanyakan desa telah memiliki klinik kesehatan; beberapa mendapat fasilitas pendidikan dan sekolah baru termasuk guru dan peralatan mengajar; desa lain memiliki dermaga baru yang mampu meningkatkan kegiatan nelayan serta pengangkutan barang-barang di musim air surut. Fasilitas air bersih tersedia atau tengah dibangun di kebanyakan desa yang terkena dampak.³⁰ Program Aksi Masyarakat/PAM tahun ini harus dilanjutkan terus setelah fase pembangunan selesai.

Terpisah dengan program PAM tahunan di setiap desa yang terkena dampak, BP telah melakukan pembicaraan kesepakatan dengan Muhammadiyah, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Yayasan pendidikan Katolik (YPPK), untuk menyediakan guru bagi desa-desa yang terkena dampak. Dukungan pendidikan ini harus dilanjutkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Juga, karena pentingnya pendidikan, Panel mendesak BP untuk menjamin agar semua sekolah dan perpustakaan di desa-desa yang terkena dampak Proyek diberi bantuan buku dan bahan-bahan lainnya. Panel juga merekomendasikan agar BP membentuk program beasiswa ke UNIPA atau Universitas Cenderawasih bagi para pelajar yang berbakat dari kawasan ini.

Sebagai tambahan dari program khusus ini, Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh yang memiliki dua dokter full-time, telah mencapai kemajuan yang sangat positif di bidang Kesmas di kawasan Teluk Bintuni. Karena terbatasnya sebagian besar program kesehatan yang ada, Unit Kesehatan memfokuskan pendekatan yang bersifat berkelanjutan di mana penduduk desa memahami keuntungan serta mengadopsi program sebagai milik mereka sendiri. Klinik-klinik telah dibangun di

³⁰ Daftar komplit dari Proyek Aksi Masyarakat (PAM) di setiap desa yang terkena dampak proyek ada dalam lampiran 2.

kawasan Babo serta di lokasi LNG, juga di beberapa desa yang terkena dampak Proyek; dan pelebagaan program pengawasan penyakit malaria di kawasan ini telah dilaksanakan dengan menunjukkan kemajuan yang berarti.³¹ Unit Kesehatan juga mengadakan program kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi anak, serta imunisasi di semua desa; juga telah mencatat keberhasilan mengurangi angka kematian disebabkan oleh penyebaran diare melalui pelatihan bagi para pekerja kesehatan serta penyediaan pengobatan Oralit. Unit Kesehatan juga mengadakan pelatihan penyadaran HIV/AIDS bagi para staf keamanan serta pegawai penyedia makanan di Babo.³² Setelah empat tahun, terdapat bukti bahwa kawasan ini mendapat keuntungan dari sisi pelayanan kesehatan, meski masih banyak sisi yang harus dikembangkan lagi.

Disamping keuntungan yang telah tersedia di desa-desa tersebut cukup jelas bagi Panel bahwa desa-desa di selatan menerima keuntungan bidang prasarana dan perumahan lebih besar dibanding kawasan pantai utara. Hal ini tampak jelas di Tanah Merah dan Saengga, di mana perumahan baru dan fasilitas publik lainnya telah dibangun juga listrik, yang kesemuanya termasuk dalam persyaratan LARAP.³³ Keuntungan bagi kawasan utara termasuk klinik kesehatan serta pelayanan kesehatan; fasilitas pendidikan dan dukungan penyediaan guru baru, buku dan bahan pengajaran; peningkatan peralatan dan pelatihan perawatan mesin motor tempel; pendanaan dan pelatihan mikrofinance; serta program pemberdayaan perempuan. Namun begitu peningkatan prasana dan perumahan yang tampak nyata di kawasan selatan tentu saja

³¹ BP harus mempertimbangkan perluasan kegiatan kontrol malaria dengan program penyemprotan di lokasi-lokasi tertentu yang digunakan penduduk desa untuk menampung air.

³² Lampiran 5 meringkas kemajuan Unit Kesehatan dalam mengurangi tingkat kematian karena malaria dan diare.

³³ Lihat laporan ketiga TIAP, hal. 15-16 yang menggambarkan rincian kemajuan yang terjadi di Tanah Merah dan Saengga.

membawa pada ketegangan dan perasaan iri, termasuk munculnya sejumlah ancaman pada Proyek. Dalam laporan sebelumnya Panel merekomendasikan agar dana terpisah dibentuk untuk mendukung pembangunan desa-desa kawasan utara . Sejauh ini tidak ada dana atau progrma yang ditetapkan, sementara pembangunan di kawasan selatan terus berlanjut..

Hal ini bisa disebabkan oleh tidak berfungsinya pemerintahan lokal sampai hari ini, khususnya selama tahun terakhir dalam masa kampanye pemilihan yang pertama kali diadakan di Bintuni. Kini hal tersebut tidak lagi menjadi masalah, setelah Bupati yang baru terpilih dan pemerintahannya sangat bersemangat untuk bekerja dengan BP dalam menyampikan manfaat di seluruh desa yang terkena dampak serta di seluruh kabupatennya. Karena itu Panel merekomendasikan agar BP bekerja sama dengan Bupati mengembangkan program di mana BP bisa menyediakan dukungan bagi penyediaan perumahan serta prasarana bagi masyarakat kawasan pantai utara sehingga ketidakimbangan ini berkurang, atau setidaknya penduduk pantai utara melihat keuntungan materiil bagi daerahnya pada saat Proyek mulai beroperasi. Secara khusus BP harus memberikan pelatihan bagi penduduk desa kawasan utara mengenai kemampuan membangun perumahan, dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah lokal di bidang program yang menggunakan sumber-sumber kayu di kawasan utara yang kini disimpan di lokasi LNG sehingga memenuhi kualitas bagi perumahan dan fasilitas lainnya.

Rekomendasi

- **Perasaan adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan penduduk kawasan pantai utara belum ditangani secara sungguh-sungguh. Sebagai prioritas, BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni untuk menetapkan program di mana BP dapat mengambil peran mendukung pembangunan perumahan di pantai utara, penyediaan listrik atau peningkatan prasarana lainnya, yang akan membantu memperbaiki adanya prasangka perlakuan tidak adil ini.**

- **Program Aksi Komunitas / PAM tahunan harus dilanjutkan setelah lewat masa fase pembangunan untuk menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek khusus yang dipilih oleh wakil-wakil dari setiap desa yang terkena dampak (DTDP).**
- **BP harus bekerja sama dengan Bupati Bintuni dalam menjamin dukungan pendidikan disediakan bagi desa-desa yang terkena dampak Proyek, yang kini ditangani tiga yayasan keagamaan benar-benar terlaksana secara efektif dan terpadu dengan program pendidikan pemerintah. Juga harus dipertimbangkan penyediaan dana bea siswa Tangguh ke universitas di Papua.**
- **BP harus melanjutkan pekerjaan bidang Unit Kesehatan Masyarakat , khususnya dalam hal upaya mengontrol atau mengurangi bahaya malaria serta penyebaran diare di desa-desa tersebut; juga menangani permasalahan kekurangan gizi pada anak. BP harus juga meningkatkan pendidikan penyadaran HIV/AIDS yang meliputi semua pekerja baru di lokasi LNG dan pangkalannya di Babo.**

VII. Koordinasi dan Dukungan Bagi pemerintah Daerah

Dalam laporan sebelumnya Panel mendesak BP untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya setelah pembentukan Kabupaten Baru Bintuni. Sejumlah usaha telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini namun berbagai kondisi diluar kontrol BP menyebabkan terhambatnya kemajuan yang diinginkan. Dampak praktis jangka pendek dari pemilihan langsung di Bintuni Agustus 2005 adalah adanya berbagai calon yang berkampanye memperebutkan posisi Bupati, diikuti dengan pemilihan kontestan yang tidak selesai sampai bulan November. Dengan begitu, tidak terdapat Bupati yang bisa diajak bekerja sama selama hampir setahun.

Namun pemilu kini memberikan hasil jangka panjang dengan terpilihnya Bupati yang amat bersemangat untuk bekerja sama dengan BP meningkatkan kondisi dan pembangunan di kawasannya. Bupati menekankan bahwa program-program BP sangat penting bagi pembangunan kawasan itu, namun juga harus tetap menjadi bagian dari Rencana Besar/Master Plan Kabupaten. Panel sepakat bahwa BP memiliki peran penting bagi rencana keseluruhan, namun harus tetap

mengkoordinasikannya dengan pemerintah agar tak terjadi ketegangan tambahan diantara atau dengan desa-desa yang terkena dampak. Dengan terpilihnya Bupati baru, Panel merekomendasikan koordinasi akan memberikan keberhasilan lebih besar sehingga perlu dilakukan secara aktif. Ketidakpastian di Manokwari juga menyebabkan kerja sama belum terbentuk secara kondusif. Pemilihan gubernur Irian Jaya Barat baru-baru ini menekankan perlunya BP bekerja sama dengan para pejabat utama di Manokwari serta melanjutkan kerja sama serupa di Jayapura. BP harus berkonsultasi dengan para pemimpin di kedua kota ini secara rutin berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan ekonomi dan sosial.

Sejumlah keluhan muncul di tingkat pemerintahan daerah terhadap kurangnya koordinasi dan kerja sama dari pihak BP. Memang akan sulit mencapai setiap permintaan yang muncul, namun jelas peningkatan konsultasi sangat penting dan bisa dipenuhi. Pertemuan reguler disarankan diadakan di tingkat Babo dan Aranday – serta di tingkat kabupaten yakni di Bintuni. Permintaan ini harus dihormati, pertemuan dengan para pejabat harus ditetapkan, agenda harus dibentuk dan catatan tertulis harus tersedia.

Salah satu elemen kritis dari hubungan BP dengan pemerintah setempat adalah dukungannya dalam pembangunan kapasitas, khususnya memperkuat lembaga setempat dalam kemampuannya mengolah sumber daya serta menyampaikan layanan secara efektif. Tidak mengejutkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas. Sebagaimana ditunjukkan oleh Laporan Bank Dunia, lembaga-lembaga tersebut tak hanya baru saja dibentuk, tetapi para personilnya juga tidak memiliki pengalaman atau standar, serta, banyak dari instansi di Bintuni tidak memiliki fasilitas memadai serta prasarana untuk menjalankan tugasnya. Hasilnya adalah, pengeluaran yang berlebihan bagi berbagai keperluan yang tidak penting serta bagi

personil, dan tidak terdapat cukup perhatian terhadap perencanaan strategis serta penganggaran yang transparan. Kepentingan semua pihak akan terlayani dengan baik bila fungsi-fungsi pemerintah daerah diperkuat sebelum terjadinya aliran masuk besar-besaran dari tambahan pendapatan dari Tangguh.

Panel sebelumnya telah mendorong BP untuk bekerja sama dengan USAID, DFID dan UNDP terhadap tujuan ini, dan ini memang telah dilaksanakan. Salah satu mekanisme yang dilaksanakan adalah kemitraan dengan USAID, dibawah program Aliansi Pembangunan Global, dengan fokus khusus Kawasan Kepala Burung. Dalam pemahaman Panel, program tiga tahun yang dimulai tahun 2002 ini telah berakhir, dan pembicaraan tengah berlangsung untuk mengembangkan kerja sama lanjutan. Panel mendukung tujuan ini sepenuhnya dan mendesak BP memperjelas usaha gabungan seperti ini secara khusus memfokuskan pada pembangunan lembaga pemerintahan di Bintuni dan Manokwari, khususnya perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, serta kemampuan anggaran.³⁴ Panel merekomendasikan upaya pembangunan kapasitas diperluas pada masyarakat sipil (LSM lokal dan media) serta lembaga-lembaga keagamaan, yang akan berfungsi sebagai mitra yang efektif dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Laporan Bank Dunia membahas empat wilayah hukum di Papua, namun tak satupun adalah kawasan Kepala Burung. Bank Dunia tertarik melanjutkan penilaiannya di wilayah lain di Papua. Panel mendukung agar BP menyediakan dukungan bagi laporan lanjutan yang memasukkan analisa kemampuan keuangan di Bintuni serta pemberian saran-saran pengelolaan keuangan lebih baik.

³⁴ Panel mengetahui bahwa BP telah menandatangani nota kesepakatan dengan UNDP dengan tujuan serupa -- "kapasitas 2015 di Papua" -- yang tengah berlangsung. Program USAID harus melengkapi program yang tengah berlangsung ini.

Rekomendasi

- Dengan telah terpilihnya Bupati Bintuni, Panel menekankan kembali rekomendasi sebelumnya agar BP meningkatkan koordinasinya dengan kabupaten baru. BP harus membentuk hubungan kerja yang kuat dengan Bupati serta pejabat-pejabat utama di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Harus dibangun pula jalur kontak serupa dengan para pejabat di Manokwari/Jayapura.
- Di tingkat daerah, BP harus meningkatkan konsultasinya dengan pemerintah tingkat kecamatan. Pada khususnya, pertemuan berkala harus diadakan dengan para pejabat tingkat kecamatan di Babo dan Randay, memberikan informasi kepada para pemimpin di kawasan itu tentang kemajuan proyek serta memberi kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap pengelolaan Proyek tangguh.
- BP harus mendukung USAID serta lembaga dana lainnya dalam menjalankan program mereka memperkuat kapasitas kelembagaan diantara pemerintah daerah serta masyarakat sipil di kawasan Kepala Burung; dengan memfokuskan diri pada pembangunan perencanaan strategis, pengelolaan keuangan serta kapasitas anggaran.
- BP harus mendorong dan mendukung langkah lanjutan dari laporan penilaian Bank Dunia baru-baru ini yang secara khusus membahas penyampaian layanan dan pendanaan bagi Kawasan Kepala Burung.

VIII. Aliran Pendapatan di Kawasan Kepala Burung

Di setiap laporan sebelumnya Panel menyatakan kekhawatiran pada penundaan antara pembangunan Proyek dan dimulainya pendapatan substansial dari Proyek di bawah Otonomi Khusus. Penundaan ini berakibat dari prioritas yang diberikan pada pembayaran transaksi minyak, biaya balik modal, serta pembayaran utang seperti yang disyaratkan dalam the Production Sharing Agreement (“PSC”).

Panel juga khawatir kalau pendapatan dari proyek ini mulai mengalir, hasilnya akan sangat besar sehingga menenggelamkan sumber-sumber pendapatan yang saat ini ada yang masuk ke tingkat propinsi serta pemerintah daerah.

Kekhawatiran Panel dalam arti terbatas berkurang dengan pemahaman kebijakan yang ada mengenai Otonomi Khusus serta meningkatkan penjelasan

mengenai pendapatan dan di Papua yang tersedia dalam Laporan Bank Dunia.³⁵ Pertama, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kini berniat memperlakukan Papua sebagai unit ekonomi tunggal, meski terbagi dalam kawasan politis yang berbeda. Tentu saja ini bisa berubah, namun sejauh ini pernyataan tersebut menghilangkan kekhawatiran utama Panel bahwa Propinsi dan kabupaten-kabupaten di Irian Jaya Barat akan menerima bagian sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali dari pendapatan Otonomi Khusus, sebelum pendapatan dari Tangguh mulai masuk. Dibawah kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini berlaku, semua pendapatan Otonomi Khusus akan dialokasikan seluruhnya bagi Papua dan disebarkan melalui peraturan yang ada atau melalui *perdasus* yang dikeluarkan Gubernur DPRD dengan persetujuan MRP.³⁶

Kedua, Laporan Bank Dunia yang dipublikasikan menyediakan gambaran akurat dan terbaru mengenai pendapatan dan pembelanjaan propinsi dan pemerintah daerah. Anggaran Papua meningkat dramatik sejak penerapan Otonomi Daerah (desentralisasi) tahun 1999 dan Otonomi Khusus tahun 2001. Dinyatakan, pendapatan Papua (kombinasi propinsi dan pemerintah daerah) berlipat ganda antara tahun 1999 dan 2002, dan terus mengalami peningkatan.³⁷ Ini merupakan hasil langsung dari alokasi besar-besaran dibawah dua aliran dana desentralisasi yakni

³⁵ Lihat "Papua Public Expenditure Analysis: Regional Financial and Service Delivery in Indonesia's Most Remote Region." Laporan Bank Dunia memberikan penilaian menyeluruh terhadap keadaan keuangan saat ini di tingkat propinsi dan pemerintah daerah di Papua, serta memberikan saran-saran bagi stabilitas keuangan bagi pemerintah yang bersangkutan.

³⁶ Masih belum jelas bagaimana hal ini akan berfungsi kalau ada dua pemerintah propinsi dan terjadi ketidaksepakatan diantara mereka.

³⁷ Lihat laporan bank Dunia hal. 1. Lebih jauh bulan Desember Gubernur Solossa mengindikasikan dana Otonomi Khusus Papua akan berlipat antara tahun 2005 dan 2006 sehingga alokasi umum juga akan meningkat dalam periode ini.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU) , serta Dana Otonomi Khusus (DAK). Pemerintah daerah menerima sekitar 90% dari dana-dana ini.³⁸

Karena itu, pendapatan tambahan dari Tangguh harus dilihat dalam konteks pendapatan yang lebih tinggi dan lebih luas mengenai cara-cara dana ini dialokasikan. Jumlah pasti pendapatan gas alam akan tergantung dari berbagai faktor yang hanya bisa diperkirakan untuk saat ini, misalnya pengembalian modal, tingkat produksi dan harga gas. Sebelumnya Panel memperkirakan pendapatan Papua dapat mencapai USD \$200 juta per tahun setidaknya selama satu dekade; dan perkiraan ini masih tampak beralasan.³⁹ Namun begitu pendapatan ini akan dibagikan diantara pemerintahan propinsi, Kabupaten Bintuni serta pemerintah daerah lainnya, beberapa melalui presentase pembagian sisanya melalui peraturan khusus.⁴⁰ Berapa pun yang dialokasikan, pemerintah propinsi dan daerah akan menerima jumlah cukup besar dari Tangguh, namun ini tidak akan menenggelamkan pendapatan lain yang mengalir ke propinsi seperti yang dikhawatirkan semula. Mengingat akan terjadinya peningkatan pendapatan ini, penting bahwa BP mendorong pemerintah pusat, propinsi dan daerah untuk menerapkan rekomendasi dari Laporan Bank Dunia serta menjamin transparansi lebih luas terhadap anggaran, pendapatan, serta pembelanjaan.⁴¹

³⁸ DAU dan DAK memenuhi sekitar 60% pendapatan Papua. Dari jumlah ini Pemda menerima 90% dari DAU dan 100% DAK, pemerintah propinsi menerima sisanya sejumlah 10% dari DAU. Tidak jelas bagaimana dana Otonomi Khusus dialokasikan diantara propinsi dan pemerintah daerah, namun kini berjumlah sekitar 24% dari total pendapatan.

³⁹ Laporan bank Dunia memperkirakan puncak pendapatan akan mencapai \$170 juta.

⁴⁰ Pembagian pendapatan dari gas alam Tangguh setelah pajak dibagi antara Pemerintah Pusat, yang menerima bagian 30%, dan Papua menerima 70%. Bagaimana bagian 70% ini dibagikan di dalam Papua akan ditentukan dengan undang-undang. Dibawah UU Otonomi daerah jumlah 30% dibagi menjadi: 6% untuk pemerintah propinsi, 12% untuk kabupaten penghasil (dalam hal ini Kab Bintuni), dan 12% untuk pemda lainnya di Papua. Siasnya sejumlah 40% diberikan ke Papua dibawah UU Otonomi Khusus. Pembagian dana itu tidak diatur dalam persentase tertentu, namun melalui aturan khusus/perda.

⁴¹ Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa “salah satu keluhan dari pemerintah daerah di Papua adalah kurangnya transparansi dalam hal pembagian pendapatan sumber daya alam.” ; Laporan Bank Dunia, hal. 27. Lebih tepatnya, pemerintah daerah kerap tidak diberi tahu tentang jumlah produksi dan harganya sehingga sulit untuk menentukan

Ketiga, pendapatan akan meningkat secara berkala lebih dari yang diperkirakan Panel sebelumnya. Papua mungkin akan mulai menerima keuntungan Tangguh secepatnya tahun 2009, dan peningkatan pendapatan ini harus dilakukan secara bertahap/ tidak mendadak. Sementara peningkatan pendapatan dari gas alam mungkin tidak akan mengalir lancar, pendapatan substansial akan diterima pada peningkatan tajam di tahun 2019. Sebagai catatan tambahan, pada masa pemasukan puncak dari Proyek tahun 2019, pendapatan akan diimbangi dengan berakhirnya Dana wajib Otonomi Khusus setelah 2020. Karena pendapatan di masa datang sulit diperkirakan, BP harus menekankan perlunya tingkat transparansi yang nyata serta publikasi awal dari proyeksi pendapatan, serta berkonsultasi dengan pejabat pemerintah provinsi dan daerah sehingga mereka menerima informasi yang kurang lebih akurat mengenai waktu dan besarnya pendapatan dari Tangguh. Selain itu, sejauh isu pembagian Provinsi diselesaikan tuntas, serta sejauh persyaratan resmi pengalokasian pendapatan belum ditetapkan, hal ini akan tetap menjadi sumber keprihatinan yang harus dimonitor secara hati-hati.

Wilayah hukum yang pendapatan daerahnya akan mengalami peningkatan tajam selama periode ini adalah Bintuni. Kawasan ini akan mulai menerima pemasukan dari Tangguh secepatnya awal 2009. Setidaknya 12% pendapatan dari gas alam akan masuk ke Bintuni dengan penghitungan bagian. Ini berarti akan menambah lebih dari \$20 juta⁴² pada pendapatan tahunan pada tahun-tahun puncak produksi dan kemungkinan akan lebih tinggi dengan adanya alokasi melalui UU Otonomi Khusus.

apakah pembagian yang mereka terima sesuai dengan produksi. Lebih jauh Bank Dunia menemukan bahwa transparansi mengalami hambatan juga karena kebanyakan pemerinrah daerah di Papua tidak melaporkan anggarannya kepada pemerintah pusat. Idem, hal. 71.

⁴² Menurut Bank Dunoa kalau pemasukan dari Tangguh mencapai \$170 juta, kabupaten produsen --dalam hal ini adalah Bintuni – akan menerima Rp. 183.6 milyar atau \$20.4 juta dengan kurs Rp. 9000 per 1USD. Laporan Bank Dunia hal. 27.

Ini tentu saja akan meningkatkan anggaran Bintuni secara menyolok, yakni diperkirakan sekitar \$15 juta.

Laporan Bank Dunia tidak memberikan penilaian kapasitas keuangan Bintuni secara khusus, namun melakukan penilaian kemampuan keuangan Pemda lainnya, dan menyimpulkan bahwa kapasitas penganggaran dan pengawasan keuangan harus ditingkatkan, khususnya di Kabupaten baru seperti Bintuni. Mempertimbangkan bahwa kabupaten ini baru saja terbentuk, tidak selayaknya bagi Bintuni untuk meminjam sejumlah besar pendapatan yang akan diperoleh di masa datang untuk digunakan saat ini.⁴³ Akan lebih baik bagi pemerintah daerah Bintuni untuk mengembangkan kapasitas mengolah dana dalam jumlah besar ini secara hati-hati serta melakukan audit pengeluaran secara transparan. Bahkan, pada masa ini yakni sebelum pemasukan mencapai level puncak, sangat penting memperkuat proses pengelolaan anggaran belanja dalam Pemda Bintuni.

Rekomendasi

- **Bekerja sama dengan Bank Dunia, BP harus secara hati-hati memonitor aliran masuk pendapatan dari proyek untuk Papua dan Bintuni. BP harus mampu meyakinkan pemerintah Indonesia untuk secara transparan mempublikasikan proyeksi non-komersial, tanda terima, dan pembayaran yang digunakan dari pendapatan proyek Tangguh; serta harus berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah propinsi dalam mencapai pemahaman lebih baik mengenai ketepatan dan jumlah pendapatan dari Tangguh. BP juga harus terus melakukan review untuk menjamin agar keuntungan yang sesuai sampai ke tangan penduduk setempat sejak awal pembangunan proyek.**

IX. Lingkungan Hidup

Dengan berlangsungnya pembangunan, isu lingkungan hidup mengemuka dan nyata. Di lokasi LNG, BP wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia serta

⁴³ Lihat laporan Bank Dunia hal. 31.

persyaratan yang ditetapkan oleh AMDAL. Kegiatannya diaudit setiap dua tahun oleh Menteri Lingkungan Hidup. Panel menyaksikan sejumlah langkah yang diambil untuk melindungi hutan sekitarnya dan upaya penanaman kembali dalam jalur perimeter. Namun Panel sendiri belum bisa secara efektif memonitor kesesuaian lingkungan dari Proyek, dan menyandarkan penilaian terbatas pada informasi dari pemerintah Indonesia, pejabat lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten juga Bank Pembangunan Asia/ADB⁴⁴ serta LSM. Sejauh ini di Jayapura dan Jakarta percaya bahwa BP melakukan kerjanya secara bertanggungjawab untuk menjaga ekosistem Teluk Bintuni. Ini sebagian karena Tangguh akan memproduksi gas alam kering (gas yang belum dicairkan) dan bukannya minyak mentah; maka dari itu LSM tidak terlalu khawatir akan munculnya kerusakan lahan maupun dampak kelautan dari Proyek ini.

Tentu saja,sebagian besar kesesuaian lingkungan dari Proyek ini berada di tangan para kontraktor BP. Dalam menghindarkan segala kemungkinan ketidakpastian berkait dengan kesesuaian para kontraktor dengan komitmen AMDAL, BP harus (1) melembagakan pengawasan dan prosedur penilaian untuk menjamin agar semua kontraktor secara akurat melaporkan segala dampak lingkungan seperti yang ditetapkan dalam AMDAL; dan (2) bila mungkin mengumumkan hasil audit Menteri Lingkungan Hidup, beserta bukti bahwa memang telah sesuai dengan atau telah memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan. Kalau ditemukan pelanggaran lingkungan BP harus segera mengadakan pengawasan internal untuk menjamin agar diadakan perbaikan serta menjamin kekurangan serupa tidak terulang kembali. Akhirnya, BP harus mendorong kunjungan lokasi bagi para pejabat lingkungan untuk menunjukkan pemeliharaan yang dilakukan serta bahwa para kontraktornya sanggup

⁴⁴ Sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan pinjaman dengan Bank Pembangunan Asia/ADB, BP wajib memberikan laporan lingkungan hidup secara periodik.

menjaga lingkungan; juga untuk menghindarkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian di masa datang.⁴⁵

Secara terpisah, BP melanjutkan kerja sama dengan organisasi lingkungan nasional, termasuk The Nature Conservancy, Conservation International, World Wildlife Fund dan lain-lain, untuk membangun kapasitas lingkungan hidup dalam pemerintahan daerah Papua serta untuk melestarikan ekosistemnya yang unik. Dengan dukungan BP, Rencana Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Bakau Teluk Bintuni telah tersusun bersama Kementerian Kehutanan; sebuah survei binatang mamalia dan reptilia di Teluk Bintuni-Berau tengah berlangsung; berbagai forum dilaksanakan di Papua membahas konservasi dan pembangunann, serta dalam isu program penilaian ringkas Papua ('Papua environmental rapid assessment program'); dan sebuah buku mengenai Papua dalam seri Ekologi Indonesia tengah disusun. Kesemuanya ini merupakan kegiatan berguna dan penting dalam menyumbangkan upaya pelestarian di Papua, dan Panel mendukung BP untuk terus melanjutkan upaya ini.

Rekomendasi

- **BP harus mengumumkan setiap hasil dari audit AMDAL yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup serta lembaga penilai lingkungan lainnya atau program pemerintah lokal. BP juga harus mempublikasikan segala tindakan yang diambil dalam rangka memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi.**
- **BP harus mendukung kunjungan-kunjungan ke lokasi LNG yang dilakukan pejabat Lingkungan Hidup dari kawasan regional atau lokal, serta memberikan tanggapan segera bila muncul tuntutan berkait dengan persyaratan lingkungan hidup yang tidak dipenuhi.**
- **BP harus melanjutkan dukungannya terhadap kegiatan LSM lingkungan dalam melestarikan eksosistem Teluk Bintuni serta memperkuat kapasitas lingkungan hidup lembaga-lembaga sipil di Papua.**

⁴⁵ Bila mungkin, untuk menghindarkan segala bentuk beban tambahan, hal ini bisa dilakukan bersama dengan kunjungan Mneteri Lingkungan Hidup.

X. Informasi Publik

BP telah mencapai kemajuan tertentu dalam meningkatkan penyebaran informasi, namun upaya lebih lanjut diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dengan semua tokoh kunci di kawasan ini. BP telah membentuk radio lokal baik di kawasan pantai utara maupun selatan, dimana perusahaan bisa menyiarkan informasi tentang Proyek serta mulai mempublikasikan koran bulanan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah mencakup isu-isu berkaitan Tangguh, yang disebarluaskan secara gratis di wilayah ini. Juga disediakan brosur-brosur sederhana membahas isu khusus berkaitan dengan Tangguh. Forum komunikasi diadakan di beberapa desa membicarakan isu keamanan. Penerbitan koran empat bulanan *Tabura* dalam Bahasa Indonesia dan Inggris juga dilakukan untuk pihak-pihak yang tertarik di tingkat nasional dan internasional. Secara terpisah, liputan media mengenai Tangguh meningkat di level regional dan nasional dengan makin terbentuknya proyek.

Upaya-upaya berkomunikasi dengan penduduk lokal sangat berharga dan menghasilkan sejumlah efek, namun disamping kemajuan yang dicapai terdapat keluhan bahwa penduduk kurang mengetahui program dan komitmen BP. Komunikasi di Teluk Bintuni merupakan tantangan logistik dan teknis, dan Panel mengakui kesulitan ini. Beberapa kegiatan baru BP sangat menjanjikan, khususnya penggunaan radio serta brosur bergambar sederhana yang mudah dipahami. Hal ini harus terus dikembangkan. Radio harus dikembangkan dengan memasukan program hiburan serta program interaktif, guna mendorong warga untuk mendengarkan juga memberi ruang agar suara penduduk bisa terpublikasikan. Namun bentuk-bentuk komunikasi lainnya juga musti diterapkan. Forum masyarakat bisa diadakan untuk menyampaikan isu-isu selain keamanan, seperti penjelasan komitmen utama dibawah AMDAL. Bentuk media baru bisa dilakukan seperti penggunaan video pada isu-isu

kunci, yang bisa diputar di pusat-pusat perkumpulan masyarakat beberapa kali, atau sebagai bagian dari program jangkauan Tim Komunikasi Masyarakat BP.

Media jangkauan juga harus dilanjutkan meski saat ini makin sulit dengan adanya kebijakan pembatasan dari pemerintah Indonesia dengan melarang wartawan asing melakukan perjalanan ke Papua.⁴⁶ Peliputan kegiatan BP di Teluk Bintuni serta keuntungan yang diperoleh Papua harus dilakukan. Press releases harus disebarakan dengan memberi informasi kepada pihak media mengenai segala keberhasilan teknis serta pencapaian pembangunan masyarakat. Kalau dimungkinkan, BP harus memfasilitasi kunjungan wartawan ke kawasan ini untuk meliput dan mengadakan tur di lokasi LNG .

Rekomendasi

- **Mengakui bahwa informasi publik di Teluk Bintuni sebagian merupakan tantangan teknis, BP harus memperluas penggunaan metode inovatif dan baru yang dipunyainya dalam cara berkomunikasi, yakni menggunakan radio; serta bereksperimen dengan metode tambahan seperti forum komunitas atau video hiburan dalam menyampaikan isu-isu penting.**
- **BP harus melanjutkan upaya mencari cara publikasi media di tingkat regional dan nasional dengan sejumlah tulisan berkaitan dengan sasaran Proyek atau keberhasilan pembangunan masyarakat.**
- **Mempertimbangkan bahwa perusahaan ini telah menerapkan cara inovatif yang sangat berharga dalam menjamin agar Proyek memenuhi persyaratan yang ditentukan, BP harus mempertimbangkan menugaskan penyusunan sebuah buku mengenai sejarah Proyek yang dapat diterbitkan di saat produksi gas alam ini dimulai.**

⁴⁶ "Indonesia to maintain ban on foreign media in Papua: Juwono," The Jakarta Post (Feb 6, 2006).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR INDIVIDU DAN BADAN YANG DIMINTAI KONSULTASI 2005 CATATAN DALAM HURUF CETAK TEBAL

Pejabat Pemerintah: Indonesia

Des Alwi, Sekretaris Utama (Bidang Ekonomi), Kedutaan Indonesia di London

H.E. Soemadi Brotodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat

N.T. Dammen, Pejabat Sementara, Kedutaan Indonesia di London

Ibnu Hadi, Penasehat, Divisi Ekonomi, Kedutaan Indonesia di Washington, D.C.

Sri Mulyani Indrawati, Ketua Bappenas

Manuel Kaisepo, Menteri Kawasan Indonesia Timur

Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Perdagangan

Nabiel Makarim, Menteri Lingkungan Hidup

Agung Mulyana, Departemen Dalam Negeri

Freddy Numberi, Menteri Bidang Kelautan dan Perikanan

A. Sidick Nitikusuma, Penasehat Eksekutif Senior BPMIGAS (Badan Pengelolaan
Minyak dan gas)

I Made Pastika, Kapolda Bali, mantan Kapolda Papua

**Mayjen Setia Purwaka, Kepala Bidang Papua, Kementerian Koordinator
Urusan Keamanan dan Politik**

Dr. Ir. Sudarsono, Dirjen Depdagri

H.E. Juwono Sudarsono, mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Menteri
Pertahanan

Rachmat Sudibjo, Ketua BPMIGAS (Badan Pengelolaan Minyak dan gas)

Admiral Sumaryono, Wakil Menteri Koordinator Urusan Keamanan dan Politik

Yoga P. Suprpto, Manajer Proyek, Pertamina

Benny P. Suryawinata, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator
Politik dan Keamanan

Dr. I Made Suwandi, Departemen Dalam Negeri

**Iin Arifin Takhyani, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Alam**

Jenderal Yudhi, Wakil Ketua LEMHANAS

Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertambangan dan Energi

Jenderal Nurdin Zeanal, Komandan TNI Papua

Pejabat pemerintah: Papua

Abraham O. Atururi, Gubernur Irian Jaya Barat

Colonel Max D. Aer, Kepala Operasi Kepolisian Papua

Agus Alua, Ketua MRP

Decky Asmuruf, Sekretaris

Frans Nikopas Awak, Camat Babo

Deky Kawab, Wakil Bupati Bintuni

John Ibo, Ketua DPRD Tk I

Frans A. Wospakrik, Wakil ketua MRP

Anggota MRP

Pak Mandagan, Bupati Manokwari

Pak Mandowen, Presiden Dewan Perwakilan Manokwari

Daud Mandown, Ketua DPRD, Irian Jaya Barat

Dr. Alfons Manibui, Bupati of Bintuni

Pak Paquil, Vice Bupati of Bintuni

Mayjen. Pangdam

Kolonel Molosan, Wakil Jenderal Simbolon (pada saat Jenderal Simbolon bertugas sebagai Komandan TNI di Papua)

Bernard Nofuerbanana, pemimpin Adat Babo

Lt. Daniel Pakiding, Kepala Polisi Kab Babo

Captain Puryomo, Komandan Militer

ML Rumadas, Wakil Interim Gubernur Irian Jaya Barat

Jaap Solossa, Gubernur Papua

Colonel Suarno, Direktur Kemanan dalam Kepolisian Papua

Brig. Gen. Pol. Dody Sumantiawan, Kepala Polisi Papua

Para pejabat Pemerintah Kabupaten Bintuni

Ketua, Komite Keamanan

Direktur Perencanaan Manokwari, serta sejumlah pejabat senior di Manokwari

Pejabat pemerintah: Amerika Serikat

H.E. Ralph Boyce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia

Karen Brooks, Direktur Urusan Asia, Dewan Keamanan Nasional

Christopher Camponovo, Depdagri AS, Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Buruh

Marc L. Desjardins, Penasehat Politik, Kedutaan Besar AS di Jakarta

William A. Heidt, Penasehat Ekonomi, Kedutaan Besar AS di Jakarta

James M. Hope, Direktur Bidang Pendidikan, USAID Indonesia

Richard Hough, Direktur Program, U.S. Agency for International Development
("USAID")

Karin Lang, Depdagri AS, Biro Asia Timur dan Pasifik, Bidang Indonesia dan Timor Timur

Allan D. Langland, Wakil Direktur, Depdagri AS, Biro Asia Timur dan Pasifik,
Bidang Indonesia dan Timor Timur

Jon D. Lindborg, Wakil Direktur, USAID

Bidang Maritim Asia Tenggara (Brian McFeeters, Wakil Direktur; Donald Mattingley, Kabag Indonesia)

Anne Patterson, USAID

H.E. B. Lynn Pascoe, Duta Besar AS untuk Indonesia

Maria Pica, Penasehat Senior, Depdagri AS, Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Buruh

Fred Pollock, Direktur, Program Pengelolaan Sumber Daya Alam, USAID

Henry ("Hank") M. Rector, Sekretaris Utama, Kedutaan AS di Jakarta

Michael Uyehara, Kabag Energi dan Sumber daya Mineral, Kedutaan besar AS di Jakarta

Shari Villarosa, Penasehat Ekonomi Kedutaan besar AS di Jakarta

John Wegge, Penasehat, Bidang Desentralisasi dan Pemerintahan, USAID

Holly Wise, USAID

Pejabat pemerintah: Inggris

H.E. Richard Gozney, Duta Besar Inggris Untuk Indonesia

H.E. Charles Humphrey, Duta Besar Inggris Untuk Indonesia

Eleanor Kiloh, Sekretaris Dua (Bidang Politik) , kedutaan Inggris di Jakarta

Theresa O'Mahony, Sekretaris dua (Bidang Political), kedutaan Inggris di Jakarta

Matthew Rous, Wakil Kepala Missi, Kedutaan besar Inggris di Jakarta
Jonathan Temple, Kedutaan Inggris Washington, D.C.

Pejabat pemerintah: Selandia Baru

H.E. Chris Elder, Duta Besar, Kedutaan Selandia Baru di Jakarta

Pejabat pemerintah: China

Ma Jisheng, Penasehat (Politik) Kedutaan besar Cina di Jakarta

Tan Weiwen, Penasehat Menteri (Bidang Ekonomi dan Perdagangan), Kedutaan Cina di Jakarta.

Xu Qiyi, Wakil Sekretaris (Bidang Ekonomi dan Perdagangan), Kedutaan Cina di Jakarta.

Penduduk Kawasan Kepala Burung, Papua

Pak Biam, Camat Aranday, serta kepala desa Aranday

Neles Tebay, Pastor Gereja katolik Dioses Jayapura

Para Kepala Desa Babo

Para Kepala Desa Aranday

Penduduk desa Onar

Penduduk desa Saengga

Penduduk desa Tanah Merah, termasuk komite yang mengawasi efek dari Proyek Tangguh.

Penduduk desa Taroy

Penduduk desa Tofoi

Penduduk desa Tomu/Ekam

Penduduk desa Weriagar/Mogotira

Organisasi Non Pemerintah

American Center for International Labor Solidarity (Timothy Ryan, Direktur Program, Kawasan Asia)

Amnesty International (Charles Brown; Lucia Withers)

Asia Foundation (Rudi Jueng, Assistant Director)

British Council (Wendy Lee, Penasehat Pembangunan Sosial)

Center for Human Rights at the RFK Memorial (Miriam Young; Abigail Abrash Walton)

Citizens International (John Wells)

CTRC (Bas van Helvoort, Direktur Eksekutif)

Conservation International (Barita Oloan Manullang, Ahli Senior Konservasi Species; Jatna Supriatna, Direktur Eksekutif dan Wakil Ketua Kawasan Indonesia)

Down to Earth (Liz Chidley)

ELS-HAM (John Rumbiak)

Earthwatch (Coralie Abbott, Manajer Program Korporasi)

FOKKER (Budi Setiyanto, Sekretaris Eksekutif; Yul Chaidir, Komite Pelaksana; Robert Mondosi, Komite Pelaksana)

Human Rights Watch (Mike Jendrzejczyk)

IBLF, The Prince of Wales International Business Leaders Forum (Lucy Amis, Manajer Program Bisnis dan Hak Asasi)

Indonesia Human Rights Network (Edmund McWilliams)

**The Institution of Research, Analysis and Development for Legal Aid (LP3BH)
(Yan Christian Warinussy, SH, Direktur Eksekutif)**

International Committee of the Red Cross (Frank Sieverts, Asisten Kepala Delegasi Regional, America Utara)

**International Crisis Group (Sidney Jones, Direktur Proyek Indonesia Director;
Kathy Ward, Wakil Direktur ICG)**

International Labor Organization (Tony Freeman)

International Labor Rights Fund (Dr. Bama Athreya)

National Democratic Institute for International Affairs (Blair King)

The Nature Conservancy (Ian Dutton, Direktur untuk kawasan Indonesia; Titayanto Pieter, Manajer Konservasi Kemitraan)

Dewan Presidium Papua (Thom Beanal, **Willy Mandowen**)

Proyek Pesisir (Maurice Knight, Ketua Partai, Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir)

TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign (Danny Bates)

UK Overseas Development Institute (Michael Warner)

US-ASEAN Council (John Phipps)

West Papua Association UK (Linda Kaucher)

Wildlife Conservation Society (Dr. Nicholas W. Brickle, Manajer Program)

World Wildlife Fund (Heike Mainhardt; Benja Victor Mambai; Clive Wicks)

Sejumlah LSM dari Jayapura, Manokwari serta tempat-tempat lain di Daerah Kepala Burung, termasuk

YPPWI, LBH, YPMD dan PTPPMA

Sektor Swasta

AGI Security & Business Intelligence (Don Greenlees, Direktur, Penelitian dan Analisa)

Chemonics (Jonathan Simon, Manajer Senior)

Citigroup International (Michael Zink, Citigroup Country Officer, Indonesia)

Halliburton KBR (John G. Baguley, Manajer Proyek)

ISIS Asset Management (Robert Barrington)

JGC Corporation (Tadashi Asanabe, Direktur Proyek)

JMSB-KMSB-SIME Consortium (Ron E. Hogan, Direktur Proyek)

Kiani Kertas (Jend. TNI (Pur.) Luhut Panjaitan MPA, Presiden Komisioner)

Perform Project, RTI International (Ben Witjes, Penasehat Regional Senior PDPP)

YIPD/CLGI (LeRoy Hollenbeck, Direktur Pengembangan Usaha)

Lembaga Internasional

United Nations Development Programme (Bo Asplund, Direktur UNDP di Indonesia; Shahrokh Mohammadi, Wakil Direktur; Gwi-Yeop Son, Senior Deputy Resident Representative; Kishan Koday, Kepala Program Unit Lingkungan Hidup; and Abdurrachman Syebubakar, Kepala Program Unit Inisiatif Masyarakat)

World Bank di Indonesia (Bert Hofman, Lead Economist; Andrew Steer, Country Director, Indonesia; Scott Guggenheim, Principal Social Scientist)

**World Bank Support Office for Eastern Indonesia (Petrarca Karetji,
Coordinator; Richard Manning)**

Lembaga Akademik di Papua

UNIPA (Universitas Papua, Manokwari) (Rektor: Frans Wanggai dan Fakultas)
University Cenderawasih (Frans A. Wospakrik, Rektor, dan Fakultas; **B. Kambuaya, Rector**)

Individu

Mr. Herbert Behrstock, Konsultan pembangunan Internasional
Admiral Dennis Blair, Ret. U.S. Navy, Chair of the Indonesia Commission, Center for Preventative Action, Dewan Hubungan Luar Negeri

Dr. Jonah Blank, Anggota Staf Profesional, Senate AS dalam Komite Hubungan Luar Negeri

Professor Michael M. Cernea, Penasehat BP Bidang Pemukiman Kembali Tanah Merah

Mr. Hugh Dowson

Mr. Bennett Freeman, Principal, Sustainable Investment Strategies

Mr. Brigham Montrose Golden

Mr. Bara Hasibuan, Intern, U.S. House of Representatives International Relations Committee

Dr. Ayse Kudat, Penasehat BP Bidang Pemukiman Kembali Tanah Merah

Ambassador Edward Masters, Ketua, U.S.-Indonesia Society

Ms. Gabrielle K. McDonald, Penasehat Hak Asasi untuk Freeport McMoRan

Mr. Octovianus Mote

Mr. David Phillips, Anggota Senior dan Wakil Direktur Center for Preventative Action, Dewan Hubungan Luar Negeri

Mr. Ed Pressman

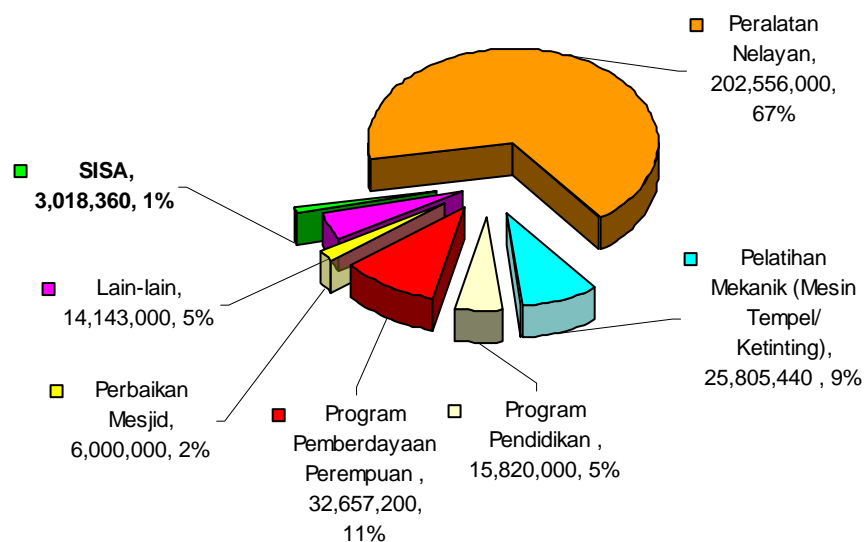
Mr. Gare Smith, Foley Hoag

Duta Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua

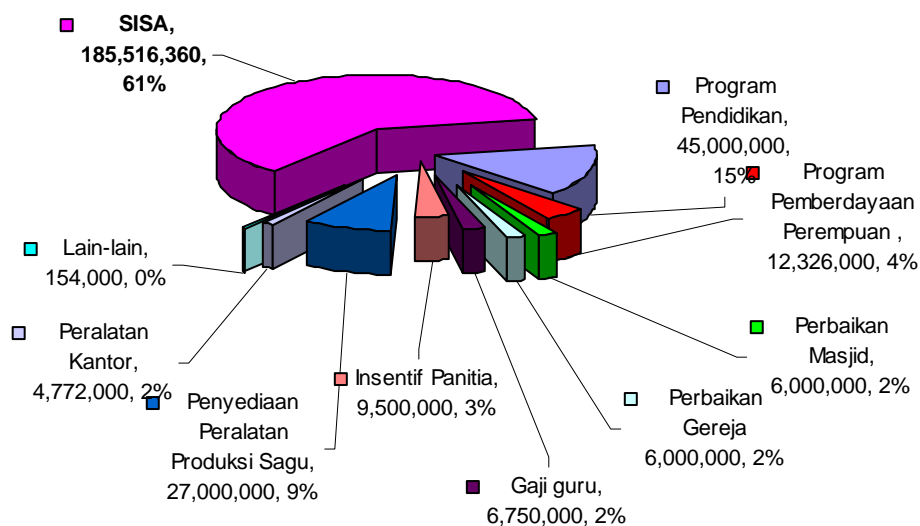
Pendeta Socrates Yoman, Ketua Persaudaraan Gereja-gereja Baptis

PAM Weriagar

Rekapitulasi PAM Weriagar 2004 - 2005

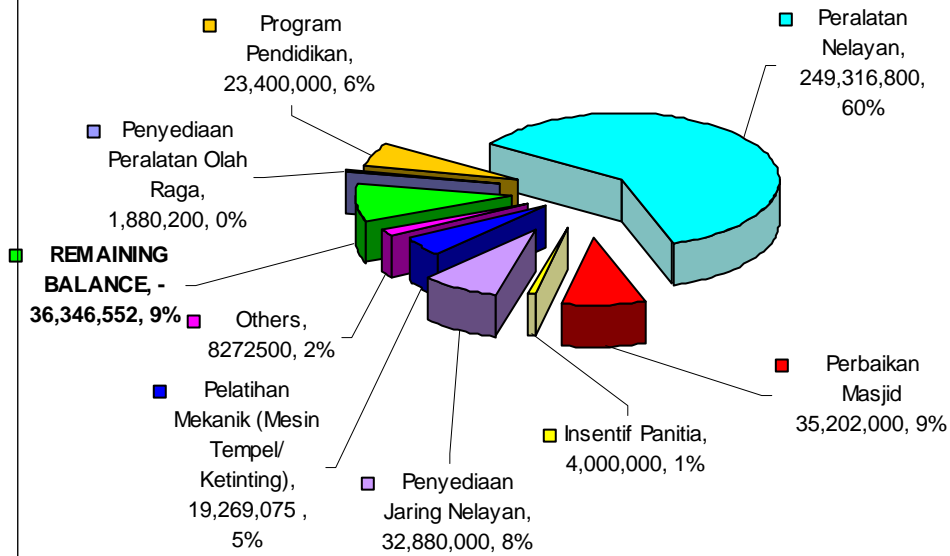


Rekapitulasi PAM Weriagar 2005 - 2006

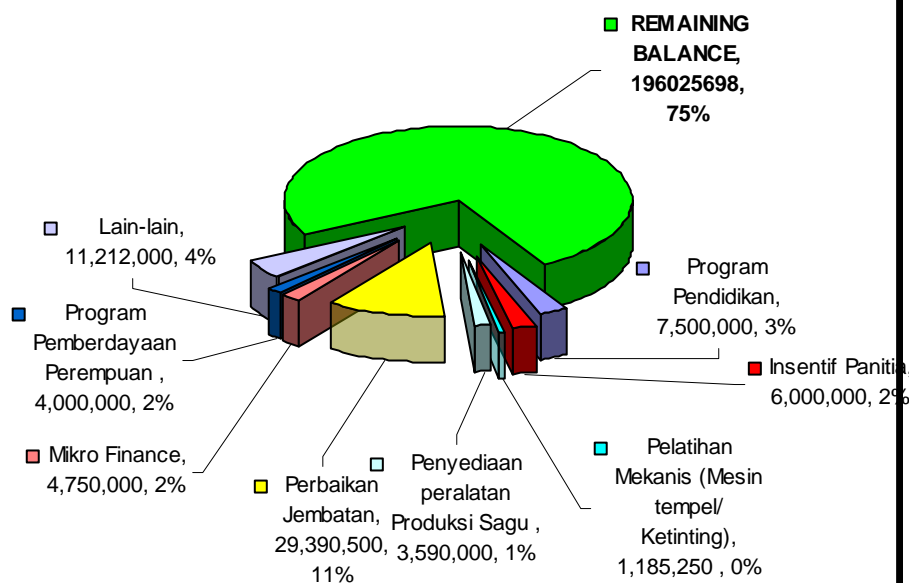


PAM Tomu

Rekapitulasi PAM Tomu 2004 - 2005

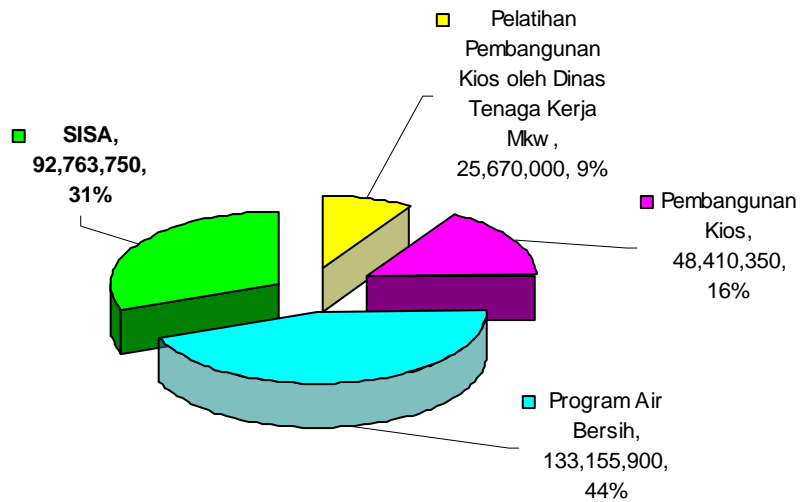


Rekapitulasi PAM Tomu 2005 - 2006

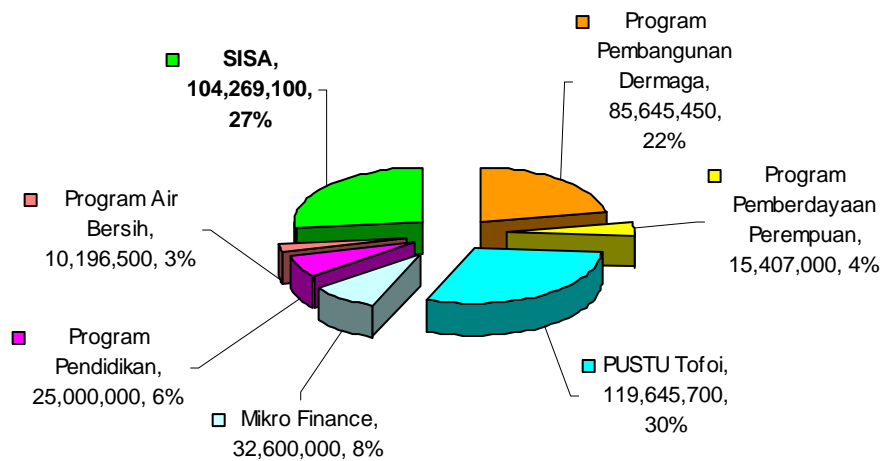


PAM Tofoi

Rekapitulasi PAM Tofoi 2004 - 2005

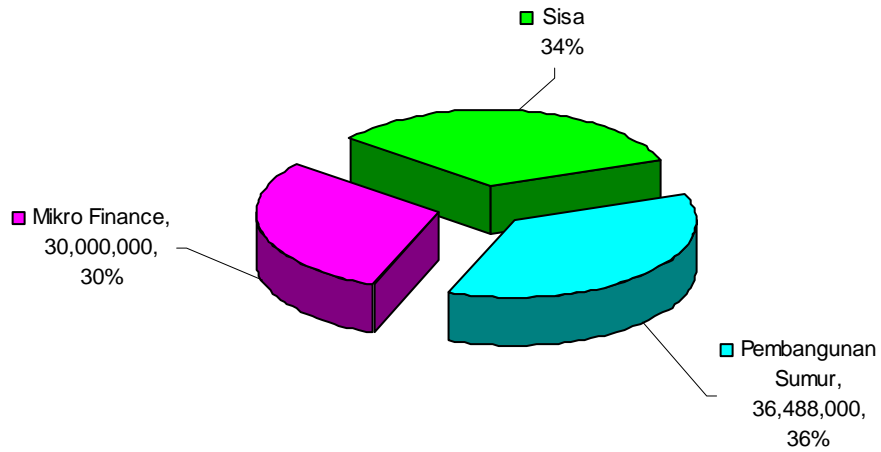


Rekapitulasi PAM Tofoi 2005 - 2006



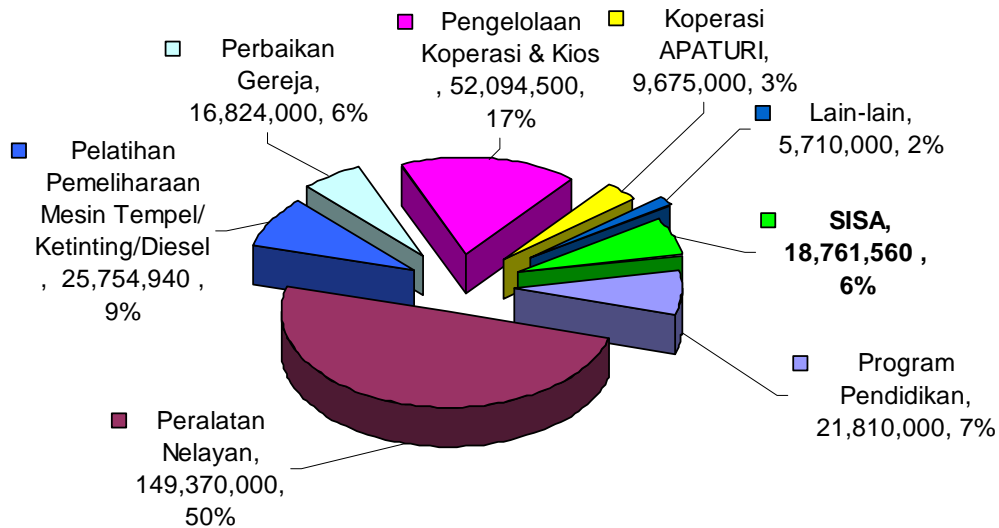
PAM Babo

Rekapitulasi PAM Babo 2003-2004

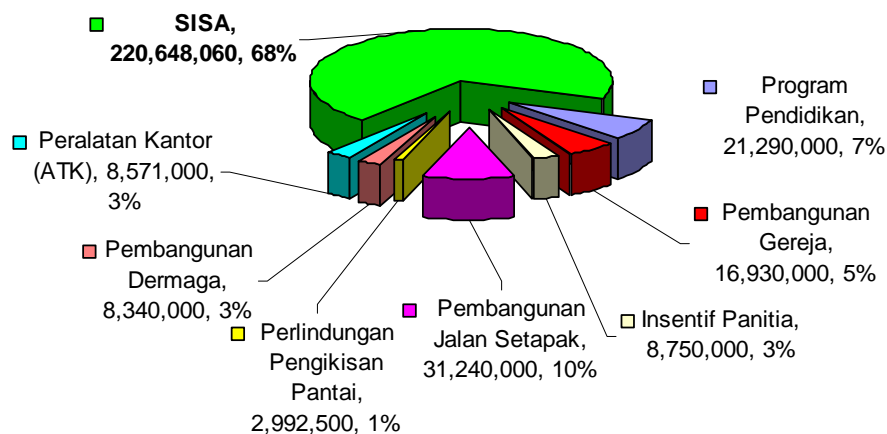


PAM Mogotira

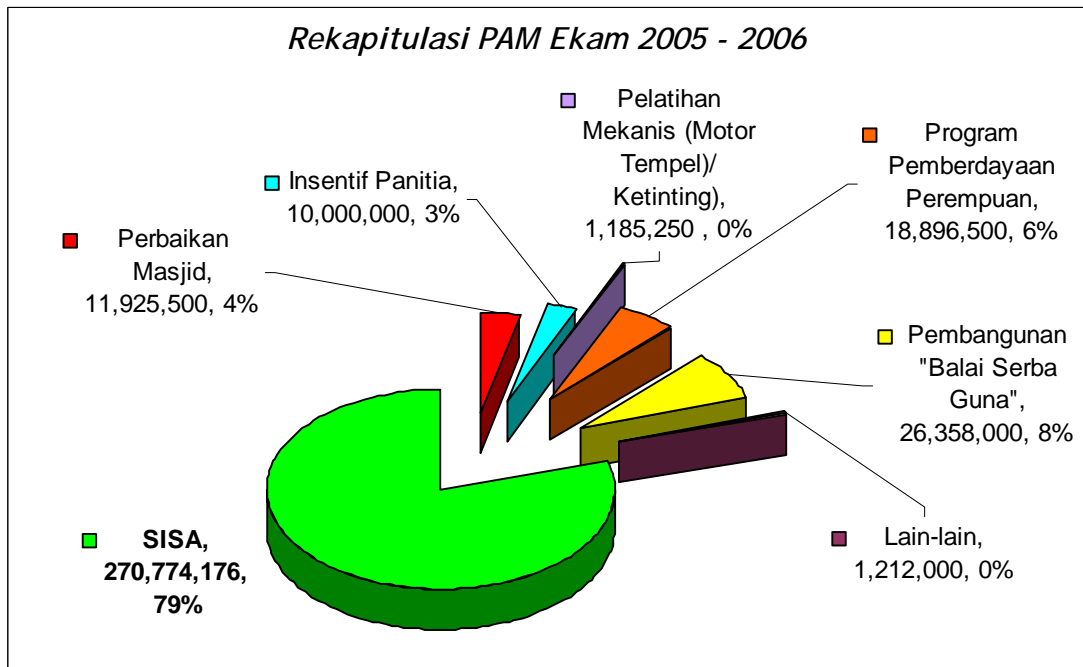
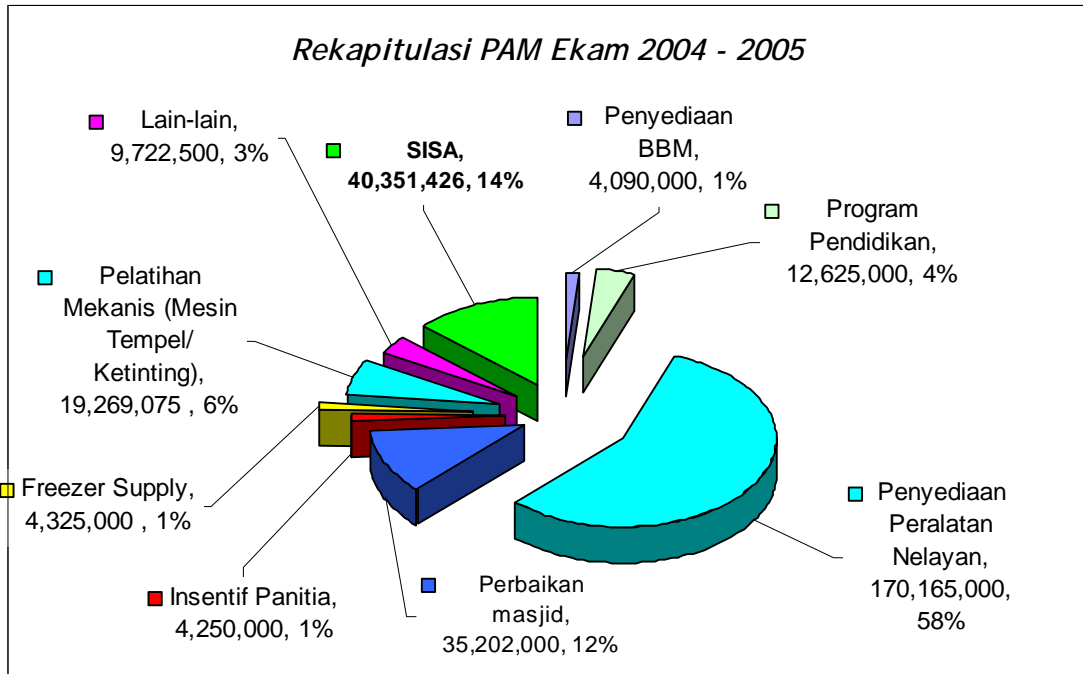
Rekapitulasi PAM Mogotira 2004 - 2005



Rekapitulasi PAM Mogotira 2004 - 2005

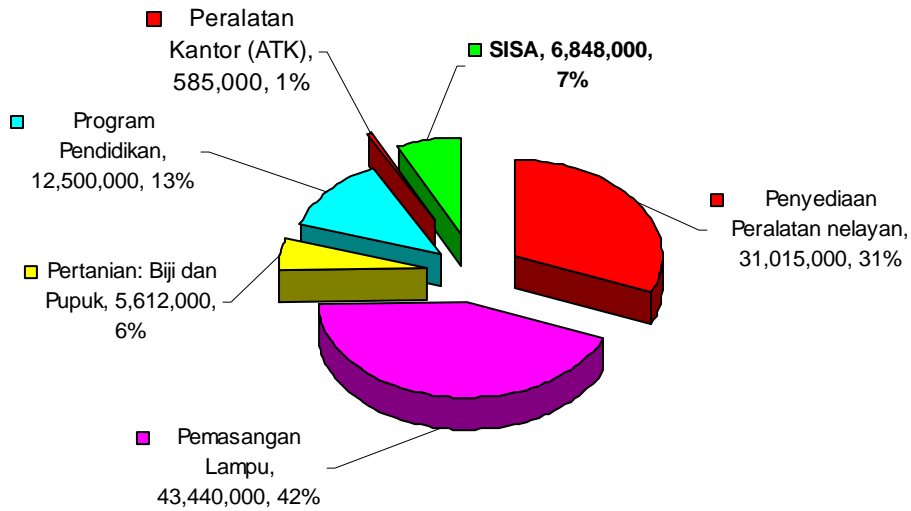


PAM Ekam

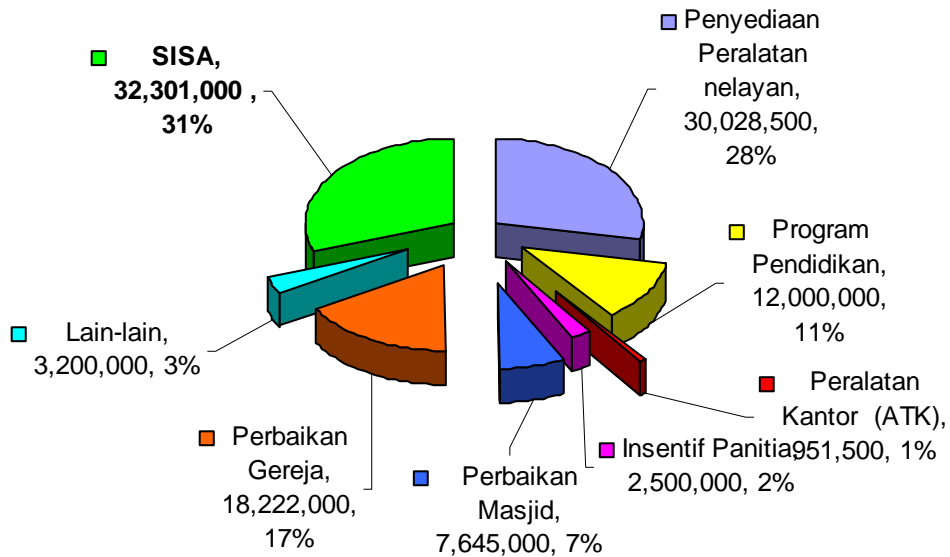


PAM Aranday

Rekapitulasi PAM Aranday 2004 - 2005

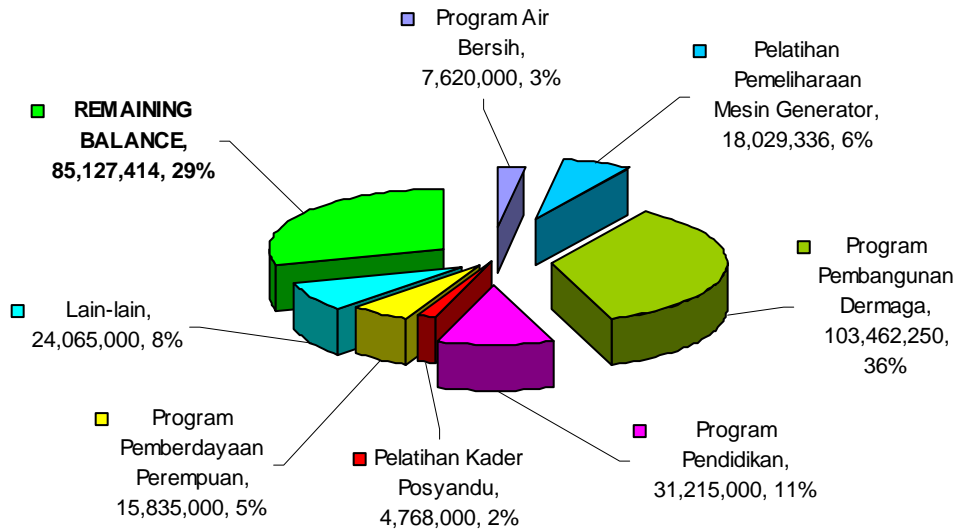


Rekapitulasi PAM Aranday 2005 - 2006



PAM Taroy

Rekapitulasi PAM Taroi 2004 - 2005



Lampiran 3

LNG TANGGUH
TENAGA KERJA ASAL PAPUA
DESEMBER 2005

Perusahaan	Warga Papua		Total Papua [3]	Indonesia Non- Papua	Warga Asing	Total
	DTSP [1]	Kepala Burung [2]				
KJP[4]						
KJP	24	24	49	44	27	120
LAJO	38	2	40	135	8	183
Calmarine (TCJO)	0	0	0	0	0	0
DSS	17	10	27	77	0	104
Leighton CI (LCI)	85	155	242	181	11	434
PBU	61	26	87	44	3	134
TUGU (TGW)	13	10	23	8	0	31
URS	0	0	0	2	0	2
Hazama (HMJO)	44	24	68	101	9	178
PENTA	42	5	47	225	9	281
BSJO	11	18	29	101	5	135
BUMA	5	11	22	1	0	23
PID	0	0	0	0	0	0
HB	0	0	0	0	0	0
SOS	0	0	0	3	0	3
EPTCO	6	2	8	22	0	30
TOTAL KJP	346	287	642	944	72	1658
Kontraktor						
Buma Perindaho	0	12	12	0	0	12
Pelayaran Tjg kumawa	1	13	14	10	0	24
Bayu Buana	0	2	2	2	0	4
Universal Babo Camp	0	29	29	10	2	41
Universal Saengga	5	5	10	3	1	14
Airfast	0	20	21	32	2	55
Firma Irian Djaya	125	80	205	139	0	344
ADHI Wamesa	97	48	150	27	0	177
Shields Security	96	155	252	13	1	266
PCI	0	5	8	2	0	10
GLOBAL	1	2	3	6	0	9
DHL	0	0	0	2	0	2
TOTAL CONTRACTOR	325	371	706	246	6	958

Pegawai BP						
BP-ISP	11	19	50	15	6	71
BP-Security Rep.	0	0	3	4	0	7
BP-Field Team	1	10	12	37	6	55
TOTAL BP	12	29	65	56	12	133
TOTAL	683	687	1413	1246	90	2749
	25%	25%	52%	45%	3%	100%

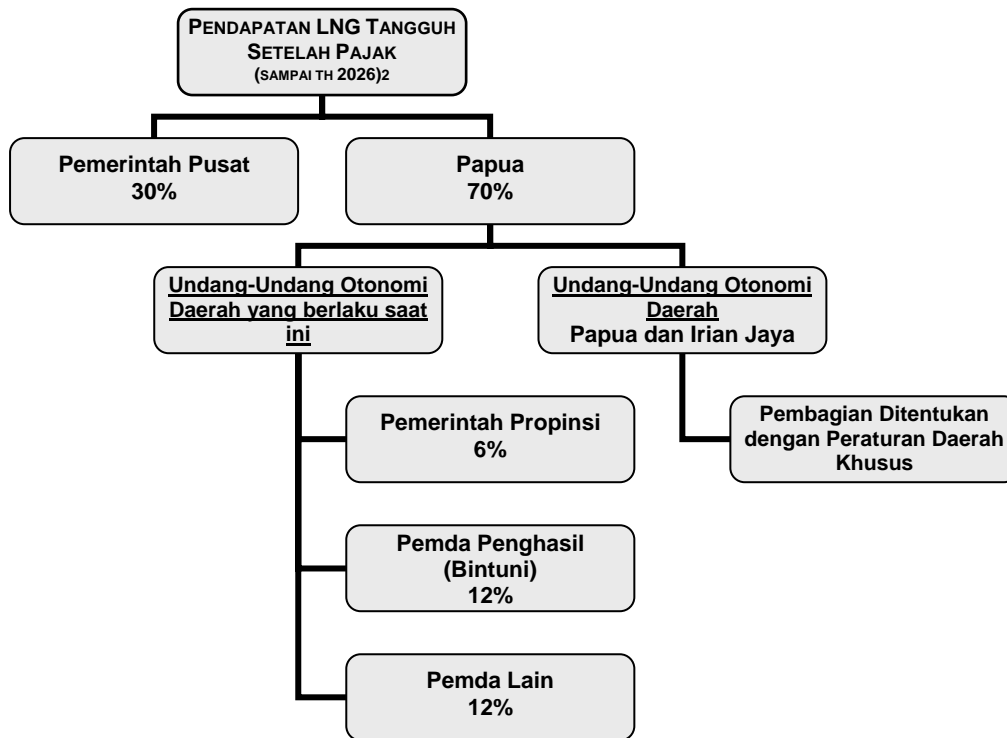
[1] Termasuk DTDP adalah Tanah Merah, Saengga, Onar, Tofoi, Otoweri, Tomage, Weriagar, Mogotira, Tomu, Ekam, dan Taroi.

[2] Termasuk Daerah Kepala Burung adalah Arandai, Babo, Bintuni, Kokas, Fak-Fak, Manokwari, dan Sorong

[3] Termasuk warga Papua dari Jayapura, Biak, dan Timika.

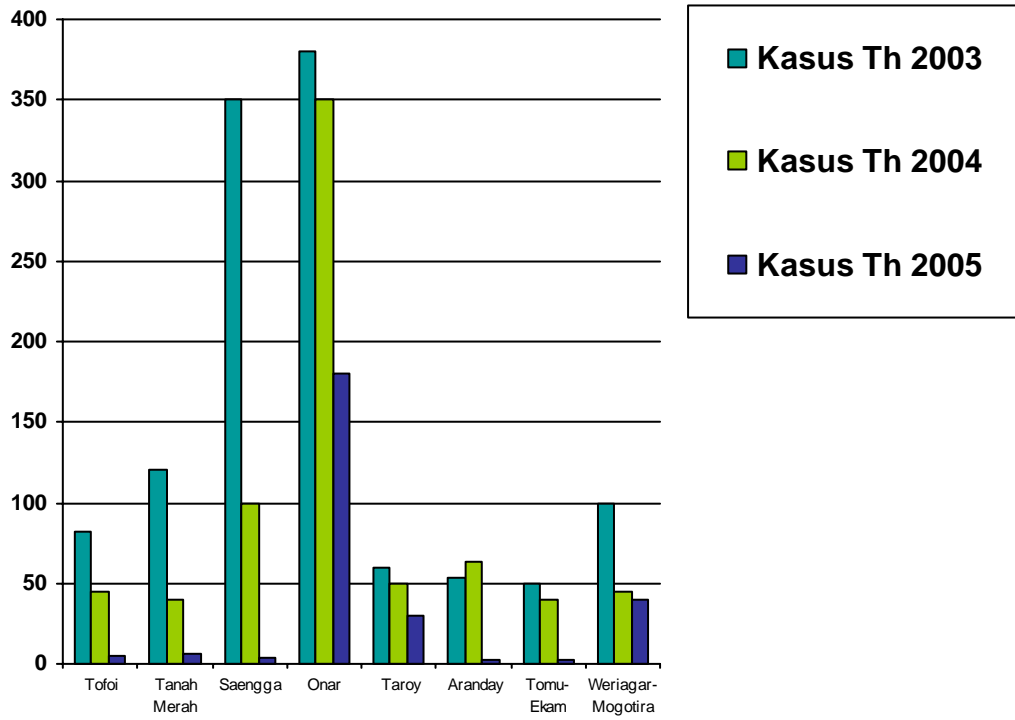
[4] Semua perusahaan dalam bagian ini adalah subkontraktor KJP, kontraktor umum Proyek LNG Tangguh.

LAMPIRAN 4
UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PEMBAGIAN PENDAPATAN GAS ALAM¹



1. Data berdasar pada laporan Bank Dunia, "Analisa Anggaran Belanja Papua: Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Penyediaan Pelayanan di Kawasan paling Terpencil Indonesia". Untuk tujuan pembagian pendapatan, Pemerintah Indonesia memperlakukan Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai unit ekonomi tunggal.

Lampiran 5
Kasus Malaria di Desa-Desa yang Terkena Dampak Proyek



Lampiran 5
Angka Kematian Epidemi Diare di Bintuni

